

# LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

# KATA PENGANTAR

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat ini disusun sebagai salah satu perwujudan atas pelaksanaan visi, misi, dan tupoksi yang diembannya kepada publik, yang bersifat tahunan .

Pelaksanaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, harus bertolak dan bermuara pada tujuan EKPD yakni menilai kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah sebagaimana diamanatkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No. 32 tahun 2004.

Melihat urgensi dari pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi untuk pelaksanaan pembangunan didaerah, Pasal 27 (2) UU nomor 32 tahun 2004 memberikan amanat kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun sebuah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), yang merupakan hasil evaluasi mandiri Pemda (*self-assessment*) terhadap berbagai dimensi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. LPPD ini kemudian akan dievaluasi lebih lanjut oleh Pemerintah Pusat dalam proses Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPD) yang dilaksanakan setiap tahunnya. Hasil evaluasi kemudian akan dikembalikan kepada masing – masing Pemda sebagai masukan dalam proses perencanaan, penganggaran hingga pengembangan kapasitas kebijakan, kelembagaan dan aparatur Pemerintah Daerah.

Diharapkan apa yang telah dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu tersebut dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam pembangunan. Disisi lain, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) ini dapat menjadi cermin bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama tahun 2019 agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya. Laporan dimaksud memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat. Secara rinci hasil *evaluasi capaian kinerja fisik* terhadap 16 ( enam belas ) program dinas, diketahui bahwa semua program berkinerja sangat baik. Sementara dari hasil *evaluasi*

*capaian kinerja keuangan* terhadap 16 (enam belas) program diatas, diketahui bahwa terdapat 12 (dua belas) program yang berkinerja sangat baik , 4 (empat) program yang berkinerja baik.

Untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis Pemerintah Provinsi, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2019 memiliki 16 (enam belas) program terdiri dari 11 (sebelas) program strategis dan 5 program pendukung. *Out put* dan *out come* dari program-program strategis tersebut mempunyai korelasi / keterkaitan langsung dengan indikator kinerja pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021. Program serta kegiatan yang telah dilaksanakan dimaksudkan sebagai bentuk peran serta aktif Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mewujudkan *good governance*.

Diharapkan apa yang telah dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu tersebut dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Disisi lain, LPPD ini dapat menjadi cermin bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama tahun 2019 agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Padang, Januari 2020  
Kepala Dinas



**Ir. Fathol Bari, M.Sc.Eng**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19640515 199003 1 010

# DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	
Kata Pengantar.....	<b>i</b>
Daftar Isi .....	<b>ii</b>
Daftar Gambar.....	<b>iii</b>
Daftar Tabel.....	<b>iv</b>
Daftar Lampiran.....	<b>v</b>
<b>BAB 1. Pendahuluan.....</b>	<b>1</b>
1.1 Gambaran Organisasi.....	1
1.1.1 Dasar Pembentukan Organisasi.....	2
1.1.2 Tugas Pokok Organisasi.....	2
1.1.3 Struktur Organisasi.....	4
1.2 Aspek Strategis Organisasi.....	6
1.3 <i>Permasalahan Utama (Strategic Issues) yang dihadapi Organisasi</i> .....	7
<b>BAB 2. PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>9</b>
2.1 Visi dan Misi.....	9
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan.....	10
2.3 Perencanaan dan Perjanjian Kinerja.....	16
<b>BAB 3. URUSAN WAJIB.....</b>	<b>19</b>
3.1 Program dan Kegiatan.....	19
3.2 Sumber Daya Manusia.....	28
3.2.1 Jumlah Pegawai.....	28
3.2.2 Pemetaan Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan.....	28
3.2.3 Pemetaan Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan.....	29
3.2.4 Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional.....	30
3.2.4.1 Jumlah Pejabat Struktural.....	30
3.2.4.2 Jumlah Pejabat Fungsional.....	30
3.3 Alokasi dan Realisasi Anggaran.....	31
3.4 Kondisi Sarana dan Prasarana.....	48
3.5 Permasalahan dan Solusi.....	48
<b>BAB 4. TUGAS PEMBANTUAN.....</b>	<b>61</b>
<b>BAB 5. STANDAR PELAYANAN MINIMAL.....</b>	<b>67</b>
<b>Bab 6. PENUTUP.....</b>	<b>68</b>

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas PUPR tahun 2019.....	5
Gambar 3.1 Proporsi Pegawai Dinas PUPR berdasarkan kelamin Tahun 2019.....	28
Gambar 3.2 Grafik Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019.....	29
Gambar 3.3 Grafik Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Golongan Tahun 2019.....	30

# DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Peran Strategis Dinas PUPR dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.....	11
Tabel 2.2 Tabel Penyesuaian Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran.....	14
Tabel 2.3 Indikator Kinerja & Target Capaian Dinas PUPR sesuai RPJMD 2016-2021.....	15
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Awal Kepala Dinas PUPR tahun 2019.....	16
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas PUPR tahun 2019.....	17

# **BAB 1. PENDAHULUAN**

## **1.1 Gambaran Organisasi**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pemerintah berupaya mewujudkan tujuan nasional dan daerah. Dalam tataran nasional, pemerintah memiliki visi yaitu terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Sementara sebagai bagian dari Provinsi Sumatera Barat, pemerintah memiliki visi yaitu Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau yang selanjutnya disingkat dengan Dinas PUPR dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dinas PUPR sendiri memiliki peran strategis dalam mewujudkan visi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Diktum Ketiga Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi Dilingkungan Pemerintahan serta Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2012 Tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel. Sebagai perwujudannya perlu disampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kepada Presiden melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kementerian Dalam Negeri.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah yang ada di suatu wilayah atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat disusun guna memberikan gambaran tentang pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang ditetapkan dalam Perda Provinsi Sumatera Barat No. 8 Tahun 2016. Laporan ini memuat analisis kinerja dan keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera

Barat yaitu sebanyak 16 program dan 167 kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2019.

Tata cara penyusunan LAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### **1.1.1 Dasar Pembentukan Organisasi**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Perda (Peraturan Daerah) Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat awalnya merupakan bagian dari Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman (Prasjal Tarkim). Setelah Perda Nomor 8 tahun 2016 diterbitkan maka Dinas Prasjal Tarkim dipecah menjadi 2 (dua) dinas yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan). Berdasarkan Perda tersebut

### **1.1.2 Tugas Pokok Organisasi**

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 8 Tahun 2016, Peraturan Gubernur Nomor 53 tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 104 tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) diketahui bahwa Dinas PUPR merupakan dinas daerah tipe B yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
3. Pembinaan dan fasilitasi bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang lingkup provinsi dan kabupaten/kota.
4. Pelaksanaan kesekretariatan dinas.
5. Pelaksanaan tugas di bidang Keciptakarya, Pelaksanaan Jalan serta bidang Penataan Ruang.



6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Keciaptakaryaan, Pelaksanaan Jalan serta Bidang Penataan Ruang.
7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

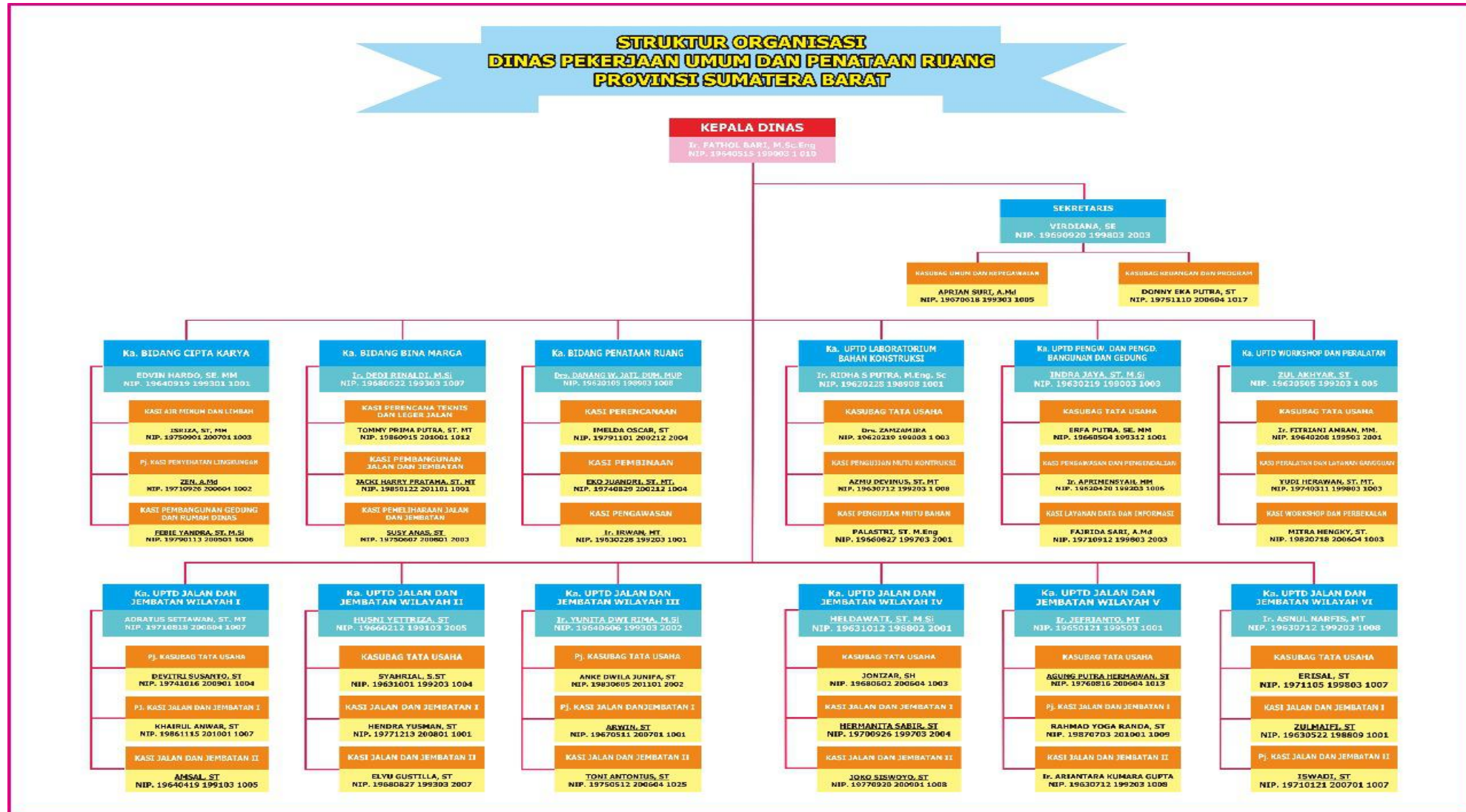
Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat dibentuk susunan organisasi dinas yang terdiri dari 4 (empat) bidang dan 9 (sembilan) UPTD sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
  - 2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 2.2. Sub Bagian Keuangan dan Program
3. Bidang Bina Marga
  - 3.1. Seksi Perencanaan Teknis dan Leger Jalan
  - 3.2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
  - 3.3. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
4. Bidang Cipta Karya
  - 4.1. Seksi Penyehatan Lingkungan
  - 4.2. Seksi Pembangunan Gedung dan Rumah Negara
  - 4.3. Seksi Air Minum dan Limbah
5. Bidang Penataan Ruang
  - 5.1. Seksi Perencanaan
  - 5.2. Seksi Pembinaan
  - 5.3. Seksi Pengawasan
6. UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
  - 6.1. Sub Bagian Tata Usaha
  - 6.2. Seksi Pengujian Mutu Konstruksi
  - 6.3. Seksi Pengujian Mutu Bahan
7. UPTD P2BG (Pegawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung)
  - 7.1. Sub Bagian Tata Usaha
  - 7.2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian
  - 7.3. Seksi Layanan Data dan Informasi
8. UPTD Workshop dan Peralatan
  - 8.1 Sub Bagian Tata Usaha
  - 8.3. Seksi Peralatan dan Layanan Gangguan
  - 8.4. Seksi Workshop dan Perbekalan
9. UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I
  - 9.1 Sub Bagian Tata Usaha

- 9.2. Seksi Jalan dan Jembatan I
- 9.3. Seksi Jalan dan Jembatan II
- 10. UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II
  - 10.1 Sub Bagian Tata Usaha
  - 10.2 Seksi Jalan dan Jembatan I
  - 10.3 Seksi Jalan dan Jembatan II
- 11. UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III
  - 11.1 Sub Bagian Tata Usaha
  - 11.2 Seksi Jalan dan Jembatan I
  - 11.3 Seksi Jalan dan Jembatan II
- 12. UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV
  - 12.1 Sub Bagian Tata Usaha
  - 12.2 Seksi Jalan dan Jembatan I
  - 12.3 Seksi Jalan dan Jembatan II
- 13. UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V
  - 13.1 Sub Bagian Tata Usaha
  - 13.2 Seksi Jalan dan Jembatan I
  - 13.3 Seksi Jalan dan Jembatan II
- 14. UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI
  - 14.1 Sub Bagian Tata Usaha
  - 14.2 Seksi Jalan dan Jembatan I
  - 14.3 Seksi Jalan dan Jembatan II
- 15. Kelompok Jabatan Fungsional

### **1.1.3 Struktur Organisasi**

Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum tahun 2019 ditampilkan pada *Gambar 1.1*. Dari struktur organisasi dapat diketahui formasi tenaga struktural yang ada pada Dinas PUPR tahun 2019.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas PUPR tahun 2019

## 1.2 Aspek Strategis Organisasi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi memegang peranan penting dalam pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat yang kemudian berkontribusi bagi peningkatan ekonomi masyarakat terutama melalui pembangunan sarana dan prasarana jalan dan jembatan, air minum, air limbah, pembangunan gedung atau bangunan negara serta penataan ruang. Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diharapkan dapat memberikan dampak yang dirasakan secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat.

Pembangunan jalan dan jembatan dilakukan untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah. Hal tersebut dilakukan dengan cara pembangunan dan peningkatan pada jalan yang belum terhubung antar daerah dan terisolir, meningkatkan prasarana perhubungan menuju destinasi wisata dan pelabuhan, serta meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan. Dengan adanya peningkatan konektivitas dan aksesibilitas ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing wilayah serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Pemeliharaan dan rehabilitasi ruas jalan yang ada juga diperlukan untuk mempertahankan kondisi kemnetapan jalan yang ada.

Disamping itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat juga memiliki peran dalam pemenuhan kebutuhan akan akses air minum dan sanitasi yang layak di Provinsi Sumatera Barat. Peran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang lainnya adalah pembangunan gedung negara, shelter dan bangunan lainnya dalam rangka rekonstruksi bangunan yang ada di Sumatera Barat. Pembangunan bangunan strategis yang dilakukan pada tahun 2019 yaitu Main Stadium Sumatera Barat, Gedung Kebudayaan, Gedung Bundo Kandung, Gedung Samsat dan Convention Hall.

Penataan Ruang memiliki peran strategis dalam mewujudkan pembangunan yang sesuai daya dukung lingkungan dan berkelanjutan. Pada Tahun 2019, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat melakukan penyusunan Rencana Tata Ruang pada Kawasan Strategis Provinsi (RTR KSP Mandeh) dan RTR KSP Pasopalapa. Selain itu Dinas PUPUR juga melakukan penyusunan database ke PUan dan Tata Ruang Provinsi, Kabupaten dan Kota serta beberapa rencana tata ruang lainnya.

Adapun program-program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat merupakan perwujudan atas misi Gubernur yaitu Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Dengan demikian pembangunan infrastruktur yang dilakukan Dinas PUPR dapat mengurangi kesenjangan antar kawasan, meningkatkan kualitas hidup dan pemerataan pembangunan.

### **1.3 *Permasalahan Utama (Strategic Issues) yang dihadapi Organisasi***

Pembangunan Sumatera Barat telah mengalami kemajuan dan keberhasilan selama beberapa tahun terakhir. Meskipun demikian masih terdapat berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan yang harus ditangani segera melalui serangkaian kebijakan, program dan kegiatan. Di bidang infrastruktur, Sumatera Barat menghadapi tantangan untuk terus berbenah menuju infrastruktur yang andal, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah salah satu OPD yang terlibat langsung dalam permasalahan infrastruktur yang ada di Sumatera Barat.

Permasalahan utama terkait infrastruktur salah satunya adalah upaya peningkatan konektivitas dan aksesibilitas wilayah masih terkendala. Penyebabnya adalah (1) masih terdapat jalan yang belum terhubung antar wilayah dan terisolir karena faktor pembebasan lahan dan keterbatasan anggaran (2) kemantapan jalan provinsi sebesar 73,015 % dengan deviasi yang cukup jauh jika dibandingkan dengan kemantapan jalan nasional yaitu 92,83 % sehingga perlu upaya pembangunan dan pemeliharaan jalan yang berkesinambungan agar nilai kemantapan jalan provinsi setidaknya mencapai 75% pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra).

Disamping itu, upaya pemenuhan kebutuhan dasar berupa akses air minum dan sanitasi layak juga masih mengalami berbagai kendala, antara lain (1) masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat (2) perlunya koordinasi dengan pemerintah daerah terkait pembangunan dan pemeliharaan aset (3) kesulitan penyediaan lahan karena terkendala pembebasannya sesuai dengan kriteria pembangunan infrastruktur dan (4) terbatasnya ketersediaan dana pembangunan.

Hal serupa, dibidang Penataan Ruang terdapat beberapa isu strategis yang perlu mendapat perhatian, yaitu (1) masih rendahnya pemahaman pemangku kepentingan dan belum terbangunnya kemitraan yang kuat dengan pemangku kepentingan terutama pemanfaatan ruang (2) rendahnya keterpaduan rencana sektor dengan rencana tata ruang, terbatasnya pedoman acuan pemanfaatan ruang dan upaya memasyarakatkannya.

Pembangunan infrastruktur telah menggerakkan ekonomi riil serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar khususnya di sektor jasa konstruksi. Tentunya hal tersebut menjadi tantangan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelaku Jasa Konstruksi dalam rangka menghadapi persaingan global. Secara regulasi, hal tersebut telah memiliki payung hukum yang jelas dengan adanya UU Jasa Konstruksi mengenai klasifikasi dan kualifikasi, pelatihan tenaga kerja konstruksi, sertifikasi kompetensi kerja, registrasi pengalaman profesional, upah tenaga kerja konstruksi, dan pengaturan tenaga kerja konstruksi asing serta tanggung jawab profesi. Dengan demikian, Dinas PUPR perlu mengawasi implementasi Undang-undang tersebut dan terus membina sektor jasa konstruksi agar semakin baik dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang andal.

## BAB 2. PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 Visi dan Misi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian visi Gubernur Sumatera Barat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2016 – 2021 yaitu **“Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera”**

Sejalan dengan pencapaian visi tersebut, misi Gubernur Sumatera Barat adalah :

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya, berdasarkan falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah,
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional,
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, beriman, berkarakter dan berkualitas tinggi,
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif dan berdaya saing regional, global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah,
5. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Berdasarkan Visi-Misi Gubernur Sumatera Barat maka Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang lebih terarah dan terfokus kepada hasil yang akan dicapai. Dalam hal ini Visi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat adalah **“Mewujudkan Infrastruktur yang handal, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan”**.

Infrastruktur yang **handal** dapat diartikan sebagai tingkat kondisi ketersediaan prasarana jalan dan jembatan yang berkualitas, menghubungkan antar wilayah di Provinsi Sumatera Barat dan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Hal ini diperlukan untuk mendukung agenda prioritas pembangunan Gubernur yaitu meningkatkan konektifitas dan aksesibilitas wilayah. Dengan meningkatnya konektifitas antar wilayah di Provinsi Sumatera Barat melalui prasarana jalan yang handal, maka diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, infrastruktur yang dimaksud juga mencakup aspek Keciptakarya yang berkualitas yang dapat diterjemahkan melalui penataan bangunan yang kokoh dan sesuai dengan fungsinya, cakupan pelayanan air minum yang layak, dan peningkatan pelayanan sanitasi sehingga menghasilkan lingkungan yang nyaman dan asri. Adapun Penataan Ruang yang berkelanjutan dalam hal ini adalah tersedianya penataan ruang yang efisien, berkelanjutan dan konsisten sehingga dapat dijadikan acuan dan rujukan dalam kegiatan pembangunan guna terciptanya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antar aspek-aspek pembangunan, ekonomi, sosial budaya, lingkungan.

Berdasarkan visi tersebut, ditetapkan tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Propinsi Sumatera Barat, yaitu :

1. Meningkatkan kinerja organisasi (tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel).
2. Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah terkait konektivitas-aksesibilitas wilayah.
3. Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah terkait penyediaan sarana prasarana umum serta pelayanan dasar masyarakat.
4. Mewujudkan penataan ruang yang berkelanjutan.

## **2.2 Strategi dan Arah Kebijakan**

Didalam dokumen awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan perubahan RPJMD Sumatera Barat (2016 – 2021) yang dibuat tahun 2018, dinyatakan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Barat merupakan OPD yang memiliki peran strategis dan tanggungjawab untuk mendukung pencapaian misi 2 (dua) dan terutama misi 5 (lima) Gubernur Sumatera Barat seperti ditampilkan pada *tabel 2.1*.



Tabel 2.1 Peran Strategis Dinas PUPR dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021

No	Misi Gubernur ke-	Tujuan ke-	Sasaran ke-	Strategi	Arah Kebijakan
1.	2. <b>Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional</b>	2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel.	1. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan pengawasan internal dan eksternal serta pengawasan masyarakat dan ketegasan tindaklanjut</li> <li>b. Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah</li> <li>c. Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah</li> <li>d. Melakukan penguatan kelembagaan pengadaan barang dan jasa</li> <li>e. Mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (e-Government)</li> <li>b. Melakukan penyempurnaan kebijakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penetapan indikator kinerja daerah, Perangkat Daerah dan individu aparatur.</li> <li>b. Penertiban dan tindaklanjut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dst... (RPJMD VI-5)</li> </ul>

No	Misi Gubernur ke-	Tujuan ke-	Sasaran ke-	Strategi	Arah Kebijakan
				<p>penyelenggaraan pemerintahan nagari/desa/kelurahan</p> <p>Meningkatkan keterbukaan dan akses masyarakat terhadap informasi publik</p> <p>c. Meningkatkan kualitas produk hukum daerah</p>	
2.	<p><b>5. Meningkatkan Infrastruktur dan Pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan</b></p>	<p>1. Meningkatkan penyediaan Infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah</p>	<p>1. Meningkatnya Kualitas Jalan Provinsi</p>	<p>a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan provinsi</p> <p>b. Meningkatkan kerjasama pembangunan dalam rangka peningkatan konektifitas dan aksesibilitas wilayah</p>	<p>a. Peningkatan pembangunan jalan dan jembatan provinsi</p> <p>b. Rehabilitasi jalan dan jembatan provinsi</p> <p>c. Pembangunan jalan dan jembatan untuk meningkatkan hubungan dan pengembangan wilayah .</p> <p>d. Penyediaan dukungan untuk pembangunan infrastruktur prioritas dan strategis nasional (dukungan pembangunan jalan tol Padang – Batas Riau dan lain-lain)</p>

No	Misi Gubernur ke-	Tujuan ke-	Sasaran ke-	Strategi	Arah Kebijakan
3.	<b>5. Meningkatkan Infrastruktur dan Pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan</b>	1. Meningkatkan penyediaan Infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah	5. Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana umum pada kawasan pemukiman/ perumahan, lingkungan dan bangunan gedung	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membenahi prasarana dan sarana umum di kawasan pemukiman/ perumahan dan lingkungan</li> <li>b. Meningkatkan peran swasta dan masyarakat dalam penyediaan prasarana umum pada kawasan pemukiman/ perumahan, lingkungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembangunan, rehabilitasi sarana dan prasarana kawasan permukiman kumuh.</li> <li>b. Pengembangan sistem pengelolaan air minum regional, tempat pembuangan akhir regional, dan drainase.</li> <li>c. Peningkatan kualitas dan penataan bangunan dan lingkungan</li> </ul>
4.	<b>5. Meningkatkan Infrastruktur dan Pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan</b>	2. Meningkatkan Pelaksanaan Tata Ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung	1. Meningkatnya Kesesuaian rencana Pembangunan dengan tata ruang	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan pengawasan, pengendalian dan pembinaan dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW</li> <li>b. Melakukan pengkajian dan penyempurnaan RTRW sesuai kebutuhan pembangunan dan aturan yang berlaku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan regulasi perencanaan, pengawasan dan pengendalian serta pembinaan mengacu pada rencana tata ruang.</li> <li>b. Penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan strategis provinsi</li> <li>c. Peningkatan peran pemangku kepentingan dalam perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian tata ruang</li> </ul>

No	Misi Gubernur ke-	Tujuan ke-	Sasaran ke-	Strategi	Arah Kebijakan
					Peningkatan keterkaitan d. antar pusat kegiatan sesuai dengan hirarki pengembangan sistim perkotaan

Sumber : Dokumen perubahan RPJMD Provinsi Sumbar (2016-2021)

Sedangkan berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 065-1038-2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 065-832-2018 Tentang Penetapan Hasil Rekomendasi Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 28 Desember 2018 dinyatakan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat mempunyai peran strategis dan tanggungjawab untuk mendukung pencapaian misi 5 (lima) Gubernur Sumatera Barat seperti ditampilkan pada *tabel 2.2*.

*Tabel 2.2 Tabel Penyesuaian Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021*

NO	TUJUAN GUBERNUR	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
<b>MISI 5: Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan</b>				
6	Meningkatkan fungsi infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah	Jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap	6.1 Meningkatnya Konektivitas dan aksesibilitas wilayah  6.5 Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar Masyarakat	6.1.1 Jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap  6.5.1 Persentase Cakupan Infrastruktur Layanan Masyarakat

Sumber : Lampiran II Keputusan Gubernur No. 065 - 1038 - 2018 (Biro Organisasi)

Tabel 2.3 Indikator Kinerja & Target Capaian Dinas PUPR sesuai RPJMD 2016-2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja awal periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun -						Kinerja akhir periode RPJMD
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	<b>Meningkatnya tata kelola organisasi</b>	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	BB	BB	A	A	A
		Persentase Capaian Realisasi Fisik&Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan *	94.5%	95%	96%	97%	97%	98%	98%	98%
2	<b>Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah</b>	Persentase Jalan Mantap	91,13% / 69%	70%	71%	72%	73%	74%	75%	75%
	<b>Meningkatkan sarana dan prasarana umum dan aparatur serta pelayanan dasar masyarakat</b>	Jumlah sarana dan prasarana penunjang tata pemerintahan	22 unit	5 unit	8 unit	8 unit	3 unit	5 unit	3 unit	54 unit (akumulasi kondisi awal-akhir periode RPJMD)
		Persentase cakupan air minum	68%	70%	72%	75%	80%	83%	86%	86%
		Persentase cakupan sanitasi	66,84%	72%	73%	75%	78%	79%	80%	80%
3	<b>Meningkatnya pelaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung</b>	Persentase kesesuaian program rencana pembangunan dengan program RTRW Provinsi	79%	80%	81%	82%	83%	84%	86%	86%

Sumber :Revisi Renstra dan LAKIP 2018

Keterangan : \* tidak digunakan lagi pada PK (Perjanjian Kinerja) Perubahan Eselon II tahun 2019 berdasarkan rekomendasi tim evaluator SAKIP dari Kemenpan RB tahun 2019.

### 2.3 Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Perencanaan Kinerja Dinas PUPR pada dasarnya mengacu pada dokumen RPJMD (2016-2021) dan visi misi Kepala Dinas yang diturunkan dari Visi-Misi Gubernur. Perencanaan Kinerja berisikan target dan indikator kinerja dari sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang ingin dicapai pada tahun 2019. Berdasarkan perencanaan kinerja tersebut maka dibuat Perjanjian Kinerja Kepala Dinas (Eselon II) sebagai bentuk komitmen antara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Gubernur Sumatera Barat selaku Kepala Daerah. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas (Eselon II) mencakup semua program kegiatan yang ada pada dinas untuk mewujudkan target kinerja yang direncanakan pada tahun 2019. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada awal Tahun 2019 ditunjukkan oleh *tabel 2.4*.

**Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Awal Kepala Dinas PUPR tahun 2019**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	a. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan b. Pelaksanaan Program/ Kegiatan Sesuai dengan Anggaran Kas	BB 97.00 %
2	Meningkatnya Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah	a. Persentase Jalan Mantap	73.00 %
3	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Umum dan Aparatur Serta Pelayanan Dasar Masyarakat	a. Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Tata Pemerintahan	3.00 unit
		b. Persentase Cakupan Layanan Dasar Masyarakat - Persentase Cakupan Air Minum - Persentase Cakupan Sanitasi	80.00 % 78.00 %
4	Meningkatnya Pelaksanaan Tata Ruang Yang Baik dan Konsekuen Berdasarkan Daya Dukung dan Daya Tampung	a. Persentase Kesesuaian Program Rencana Pembangunan dengan Program RTRW Provinsi	83.00 %

No.	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	4,816,161,000	APBD
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4,044,500,000	APBD

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	297,700,000	APBD
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	206,586,000	APBD
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1,409,151,928	APBD
6	Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi	185,970,198,000	APBD, DAK
7	Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi	45,455,344,000	APBD
8	Peningkatan Sarana dan Prasarana Ke-Binamargaan	3,145,168,000	APBD
9	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	913,790,000	APBD
10	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	243,998,918,000	APBD
11	Peningkatan dan Pengembangan Jasa Konstruksi	673,788,000	APBD
12	Perencanaan Tata Ruang	4,592,900,000	APBD
13	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	424,759,000	APBD
14	Pengelolaan dan Pengembangan SPAM lintas daerah kab/ kota	3,878,809,000	APBD
15	Pengelolaan Sistem Drainase Kewenangan Provinsi	4,950,000,000	APBD
16	Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	323,100,000	APBD
	<b>JUMLAH</b>	<b>505,100,872,928</b>	

Berdasarkan Rapat Evaluasi Kinerja di Biro Organisasi tanggal 16 Desember 2019, sesuai rekomendasi tim evaluator SAKIP dari Kemenpan RB pada saat evaluasi SAKIP Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 2019, dinyatakan bahwa **“Persentase Capaian Realisasi Fisik & Keuangan Pelaksanaan Program dan Kegiatan”** tidak lagi digunakan sebagaimana ditunjukkan pada *tabel 2.5*.

*Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas PUPR tahun 2019*

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB
2	Meningkatnya Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah	a. Persentase Jalan Mantap	73.00 %

3	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Umum dan Aparatur Serta Pelayanan Dasar Masyarakat	a. Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Tata Pemerintahan b. Persentase Cakupan Layanan Dasar Masyarakat - Persentase Cakupan Air Minum - Persentase Cakupan Sanitasi	3.00 unit  80.00 % 78.00 %
4	Meningkatnya Pelaksanaan Tata Ruang Yang Baik dan Konsekuensi Berdasarkan Daya Dukung dan Daya Tampung	a. Rencana Pembangunan dengan Program RTRW Provinsi	83.00 %

No.	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	5,495,289,048	APBD
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6,619,374,100	APBD
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	275,352,800	APBD
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	264,800,000	APBD
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1,661,967,928	APBD
6	Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi	184,577,512,989	APBD, DAK
7	Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi	48,377,347,200	APBD
8	Peningkatan Sarana dan Prasarana Ke-Binamargaan	3,735,168,000	APBD
9	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	913,790,000	APBD
10	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	214,708,096,624	APBD
11	Peningkatan dan Pengembangan Jasa Konstruksi	773,788,000	APBD
12	Perencanaan Tata Ruang	4,733,380,000	APBD
13	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	424,759,000	APBD
14	Pengelolaan dan Pengembangan SPAM lintas daerah kab/ kota	1,638,277,400	APBD
15	Pengelolaan Sistem Drainase Kewenangan Provinsi	4,805,000,000	APBD
16	Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	182,620,000	APBD
	<b>JUMLAH</b>	<b>479,186,523,089</b>	



## BAB 3. URUSAN WAJIB

### 3.1 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas PUPR pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1 Program/Kegiatan  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumbar Tahun 2019**

KODE REKENING	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN Rp
1	2	3
5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>479,186,523,089.00</b>
<b>1.01.1.01.03.01.001</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>5,495,289,048.00</b>
001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7,500,000.00
002	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	1,722,649,000.00
003	Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor	2,071,303,848.00
008	Penyediaan Alat Tulis Kantor	180,000,000.00
009	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	150,000,000.00
010	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	30,000,000.00
013	Penyediaan Barang Bacaan dan Peraturan Per-UU	34,500,000.00
015	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Luar Daerah	1,046,986,200.00
017	Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi	252,350,000.00
<b>1.01.1.01.03.01.002</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>6,619,374,100.00</b>
002	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	392,202,800.00
005	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1,700,000,000.00
006	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	601,200,000.00
037	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1,148,150,000.00
361	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas/Mess	2,033,827,400.00
371	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	675,993,900.00
86	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor	68,000,000.00

**Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)**

KODE REKENING	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN Rp
1	2	3
<b>1.01.1.01.03.01.003</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>275,352,800.00</b>
001	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	275,352,800.00
<b>1.01.1.01.03.01.004</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>264,800,000.00</b>
001	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	264,800,000.00
<b>1.01.1.01.03.01.005</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>1,661,967,928.00</b>
001	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	270,806,000.00
002	Penatausahaan Keuangan SKPD	999,260,000.00
003	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	184,714,000.00
005	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD	207,187,928.00
<b>1.01.03.1.01.03.01.003 2</b>	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN</b>	<b>184,577,512,989.00</b>
006	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Tapus - Muaro Sei.Lolo - Gelugur (P.101)	6,052,944,100.00
007	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Simp. Duku (Ketaping) - Pariaman (P.075)	1,476,078,000.00
010	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Palembang - Palupuh (Simp. Patai) (P.081)	3,182,085,200.00
011	Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Kantor Camat - Berkat (P.104)	3,294,320,000.00
013	Penyiapan Lahan Untuk Infrastruktur Bidang ke PU an	19,858,130,489.00
014	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Guguk Cino Sawahlunto (Lapangan Segitiga) (P.038)	5,843,480,900.00
015	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Sp. Ganting Payo - Batas Tanah Datar - Sumani (P.092)	3,206,813,800.00
016	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Manggopoh - Padang Luar (P.025)	3,304,971,800.00
019	Kegiatan Monitoring dan Pengawasan Perizinan Utilitas Umum	67,100,000.00
021	Pembangunan Jembatan Kuranji Kota Padang	16,119,397,500.00
025	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Matur - Palembang (P.080)	2,813,726,600.00
031	Perencanaan Pembangunan Jembatan Provinsi	1,732,064,300.00

**Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)**

KODE REKENING	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN Rp
1	2	3
039	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Batas Batusangkar (Bukit Gombak) - Guguk Cino (P.037)	2,724,506,100.00
040	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Simancung - Tj.Ampalu (P. 007)	4,194,115,000.00
041	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Lubuk Basung - Sungai Limau (P.072)	2,569,784,200.00
042	Pembangunan Jembatan Batu Bala (P.086)	767,875,000.00
043	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Palupuh - Pua gadih - Koto Tinggi (P.090)	3,236,976,000.00
044	Pembangunan Jembatan Lolong (P. 099)	16,124,400,000.00
046	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Padang Koto Gadang - Palembang (P.088)	2,599,915,600.00
049	Perencanaan Pembangunan Jalan Provinsi	4,271,605,300.00
052	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Batu Batembak - Pelabuhan Panasahan (P.100)	486,194,700.00
055	Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Jalan/Jembatan Provinsi	600,204,000.00
056	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073)	3,507,765,800.00
059	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Simp. Koto Baru - Tj. Simalidu (P.011)	1,000,000,000.00
060	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Abai Sangir - Sei.Dareh (P.056.3)	3,243,899,000.00
063	Updating Database Jalan Provinsi	603,843,500.00
064	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Jl. Lingkar Selatan (Payakumbuh) (P.084)	2,717,927,500.00
066	Peningkatan/Pembangunan Jalan Provinsi DAK (Pendamping)	50,486,625,000.00
067	Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Simp. Padang Aro - Lubuk Malako (P.056.1)	884,912,200.00
069	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Surantih - Kayu Aro - Langgai (P.086)	3,326,330,700.00
070	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Duku - Sicincin (P.087)	6,292,471,900.00
072	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Kegiatan Jalan Dan Jembatan Provinsi Sumatera Barat	2,155,916,000.00
074	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Pangkalan Koto Baru-Sialang-Gelugur (P.076)	2,744,185,000.00

**Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)**

KODE REKENING	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN Rp
1	2	3
076	Pembangunan Jembatan Provinsi Wilayah II	2,927,247,800.00
077	Survey Pekerjaan Mendesak dan Bencana Alam	159,700,000.00
<b>1.01.03.1.01.03.01.03 3</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN</b>	<b>48,377,347,200.00</b>
001	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Rawang - Talawi	122,120,000.00
003	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Palembang - Palupuh (Sp.Patai)	303,900,000.00
004	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Guguk Cino - Sawahlunto	761,400,000.00
006	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Sp.Koto Baru - Tj. Simalidu	414,260,000.00
007	Pengadaan Peralatan dan Bahan Jalan dan Jembatan	3,465,000,000.00
008	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Bungo Tanjung - Teluk Tapang - Bts. Sumut	58,580,000.00
009	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Batas Kota Payakumbuh - Sitangkai	3,126,650,000.00
011	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Simancung - Tj. Ampalu	273,760,000.00
012	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Batu Batembak - Pelabuhan Panasahan	27,840,000.00
013	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Tapus - Muaro Sei. Lolo - Gelugur	896,080,000.00
014	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Jln Lingkar Selatan (Payakumbuh)	551,290,000.00
015	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Simpang Padang Aro - Lubuk Malako	466,400,000.00
017	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Palupuh - Puagadit - Koto Tinggi	571,760,000.00
018	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Batusangkar - Ombilin	429,150,000.00
020	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Sp.Koto Baru - Junction	2,841,760,000.00
022	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Manggopoh - Padang Luar	1,802,150,000.00
023	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Lubuk Basung - Sungai Limau	693,900,000.00

**Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)**

KODE REKENING	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN Rp
1	2	3
025	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Bts.Sitangkai - Tj. Ampalu	428,760,000.00
027	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Padang Sawah - Kumpulan	907,700,000.00
028	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Kubu Kerambil - Batusangkar	458,900,000.00
029	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Lubuk Malako - Abai Sangir	396,400,000.00
030	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Padang Koto Gadang - Palembang	744,600,000.00
031	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Singkarak - Aripian - Tj.Balit - Pdg Ganting	716,400,000.00
033	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Junction - Abai Siat	811,760,000.00
035	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Simpang Koto Mambang - Balingka	981,400,000.00
036	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Sicincin - Kurai Taji	569,900,000.00
038	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Sijunjung - Tn Badantung	306,760,000.00
039	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Inderapura - Muara Sakai	182,500,000.00
040	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Panti - Simpang Empat	2,246,030,000.00
041	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Baso - Batusangkar	686,150,000.00
042	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Solok - Alahan Panjang	1,353,900,000.00
043	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Sp.Napar - Bukit Bual - Tj.Ampalu	329,260,000.00
044	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Payakumbuh - Suliki - Koto Tinggi	2,087,170,000.00
045	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Pintu Angin - Lubuk Saiyo	73,560,000.00
046	Pemeliharaan Peralatan Jalan dan Jembatan	1,174,400,000.00
047	Pengendalian Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan/Jembatan Provinsi	180,244,000.00

**Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)**

KODE REKENING	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN Rp
1	2	3
048	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Simpang Baso - Piladang	349,900,000.00
049	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Simpang Duku (Ketaping) - Pariaman	685,340,000.00
051	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Tj.Ampalu - Sijunjung	466,760,000.00
052	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Simp. SP II - Kantor Camat	218,800,000.00
053	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Simpang IV - Sasak	495,280,000.00
054	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Batusangkar - Guguk Cino	226,400,000.00
056	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Alahan Panjang - Kiliran Jao	667,650,000.00
057	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Pasar Baru - Alahan Panjang	517,400,000.00
058	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Rao - Rokan (Bts.Riau)	1,245,200,000.00
059	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Pangkalan - Koto Baru - Sialang - Gelugur	1,638,950,000.00
060	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Sp Ganting Payo - Batas Solok - Sumani	681,400,000.00
061	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jembatan Propinsi Dan Bangunan Pelengkap Jalan	3,938,003,200.00
062	Penanganan Kritis dan Unit Layanan Gangguan Jalan dan Jembatan Provinsi (ULG)	1,052,800,000.00
063	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Matur - Palembang	488,900,000.00
064	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Teluk Bayur - Nipah - Purus	75,000,000.00
066	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Sp.Sikabau - Sp. Koto Baru	791,760,000.00
068	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Air Balam - Air Bangis	310,280,000.00
069	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Guguk Cino - Sitangkai	434,400,000.00
071	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Abai Sangir	284,650,000.00

**Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)**

KODE REKENING	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN Rp
1	2	3
	Sungai Dareh	
072	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Surantih - Kayu Aro - Langgai	1,763,900,000.00
073	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Talu - Lubuk - Sikaping	551,530,000.00
074	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Simpang Padang Karambia - Tj. Bungo	51,250,000.00
<b>1.01.03.1.01.03.01.03 4</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN</b>	<b>3,735,168,000.00</b>
001	Pengadaan Alat-alat Ukur dan Laboratorium Ke Bina Margaan	3,180,450,000.00
002	Monitoring Pengendalian Mutu UPTD	416,966,000.00
004	Pemeliharaan Alat-Alat Ukur Laboratorium Ke Binamargaan	137,752,000.00
<b>1.01.03.1.01.03.01.03 5</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>913,790,000.00</b>
003	Penyusunan Rencana Teknis Rinci (DED) Pengembangan TPA Sampah Regional Payakumbuh	242,550,000.00
005	Studi Kelayakan Pengembangan/Pemindahan TPA Sampah Regional Payakumbuh	224,898,000.00
008	Pendampingan Program Sanimas IDB dan PPSP	446,342,000.00
<b>1.01.03.1.01.03.01.03 6</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PBL DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>214,708,096,624.00</b>
002	Lokarkarya, Sosialisasi, Forum Komunikasi dan Informasi Bangunan Gedung	826,831,050.00
003	Pembangunan Gedung Inspektorat Provinsi Sumatera Barat	497,153,700.00
004	Pembangunan Gedung Kebudayaan Sumatera Barat (Lanjutan)	30,487,863,000.00
005	Rehabilitasi Bangunan Gedung Negara	1,203,118,000.00
007	Pembinaan dan Pengelolaan Teknis (TPT) Bangunan Negara di Sumatera Barat	206,144,000.00
009	Pembangunan Gedung Kantor PPIPTEK Provinsi Sumatera Barat	496,790,250.00
010	Pembangunan Gedung Utama Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat	113,244,500.00
013	Pembinaan Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG)	628,613,200.00
015	Pembangunan Gedung Convention Hall Sumatera Barat (Lanjutan)	1,581,482,530.00

**Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)**

KODE REKENING	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN Rp
1	2	3
016	Pembangunan Shelter Evakuasi Tsunami di Musholla Jabal Rahmah di Painan (lanjutan)	500,000,000.00
019	Assesmen Bangunan Gedung dan Sertifikasi Laik Fungsi Bangunan Gedung	555,563,750.00
020	Pembangunan Gedung Bundo Kandung Provinsi Sumatera Barat	4,373,619,500.00
022	Pembangunan Lapangan Tenis Indoor Di Komplek Gubernuran (lanjutan)	146,646,950.00
025	Pembangunan Shelter Evakuasi Tsunami Linggarjati	3,926,518,700.00
026	Pendampingan Pembinaan Pengelolaan Rumah Negara di Sumatera Barat	171,766,000.00
027	Pembangunan Gedung Kantor Samsat Kota Padang	18,611,488,000.00
028	Pembangunan Stadium Utama Sumatera Barat (Lanjutan)	148,500,707,309.00
029	Pembangunan Guest House Gubernuran	976,156,000.00
030	Pembangunan Taman Wisata Kelok Sembilan	405,547,000.00
031	Penambahan Garase Rumah Dinas Gubernur	98,843,185.00
032	Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan	100,000,000.00
033	Dukungan Pelaksanaan MTQ Nasional	300,000,000.00
<b>1.01.03.1.01.03.01.03 7</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>773,788,000.00</b>
001	Lokakarya, Sosialisasi dan Forum Komunikasi Jasa Konstruksi	274,180,000.00
012	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Sumatera Barat	75,000,000.00
023	Bimbingan Teknis/Workshop Jasa Konstruksi	424,608,000.00
<b>1.01.03.1.01.03.01.03 8</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>4,733,380,000.00</b>
001	Peningkatan Pemahaman Pemangku Kepentingan Terhadap Penataan Ruang	129,180,000.00
003	Legalisasi RTR Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Metropolitan PASOPALAPA	1,064,378,000.00
004	Koordinasi Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Lintas Kab/Kota (TKPRD) Provinsi Sumatera Barat	357,406,000.00
006	Legalisasi RTR Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Mandeh Kab. Pesisir Selatan	597,616,000.00
009	Penyusunan Database ke PU an dan Tata Ruang Provinsi / Kabupaten / Kota (lanjutan)	1,615,160,000.00



**Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)**

KODE REKENING	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN Rp
1	2	3
011	Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Penataan Ruang	533,200,000.00
012	Penyebarluasan Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang	436,440,000.00
<b>1.01.03.1.01.03.01.03.9</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>424,759,000.00</b>
008	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi (UPT Balai Pengujian Konstruksi)	220,357,000.00
009	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi (UPT Workshop dan Peralatan)	204,402,000.00
<b>1.01.03.1.01.03.01.04.0</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SPAM LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1,638,277,400.00</b>
001	Pembinaan Kegiatan PAMSIMAS di Provinsi Sumatera Barat	157,350,000.00
002	Pembangunan SPAM Regional Kab.Solok dan Kota Solok	482,595,800.00
006	Pembangunan SPAM Regional Kab.Padang Pariaman dan Kota Pariaman	486,872,600.00
008	Pembangunan SPAM Kws Singgalang - Kota Pd. Panjang Kab.Tanah Datar	100,000,000.00
011	Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Keciaptakaryaan di Provinsi Sumatera Barat	311,459,000.00
013	Pengembangan SPAM Regional Kab. Agam - Bukittinggi (lanjutan)	100,000,000.00
<b>1.01.03.1.01.03.01.04.1</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DRAINASE KEWENANGAN PROVINSI</b>	<b>4,805,000,000.00</b>
001	Pembangunan Drainase Kota Bukittinggi - Kab. Agam (lanjutan)	100,000,000.00
002	Pembangunan Drainase Kab. Padang Pariaman	150,000,000.00
004	Pembangunan Drainase Kab. Solok dan Kota Solok	2,755,000,000.00
005	Pembangunan Drainase Kab. 50 Kota dan Kota Payakumbuh	1,800,000,000.00
<b>042</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG</b>	<b>182,620,000.00</b>
001	Monitoring Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten / Kota	116,120,000.00
003	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat	66,500,000.00

### 3.2 Sumber Daya Manusia

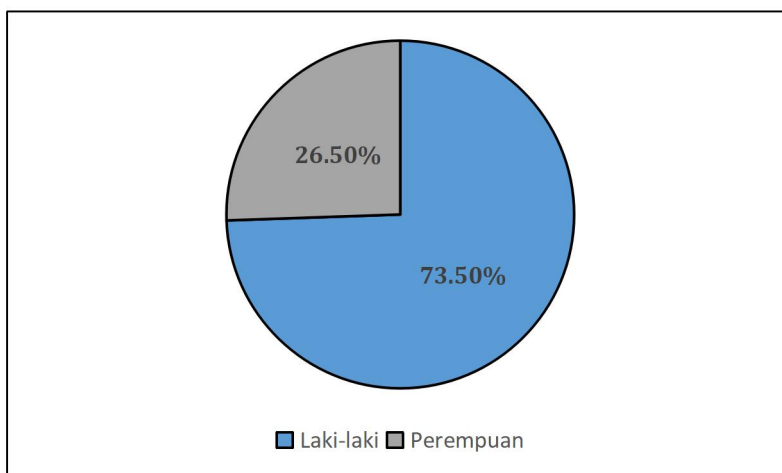
#### 3.2.1 Jumlah Pegawai

Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat berdasarkan data akhir tahun 2019 sebanyak 351 ( tiga ratus lima puluh satu ) orang Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan jenis kelamin pemetaan pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumbar ditampilkan pada tabel 3.2.

**Tabel 3.2 Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai	Persentase
Laki-laki	258 orang	73.50%
Perempuan	93 orang	26.50%

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas PUPR



**Gambar 3.1 Proporsi Pegawai Dinas PUPR berdasarkan kelamin Tahun 2019**

#### 3.2.2 Pemetaan Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

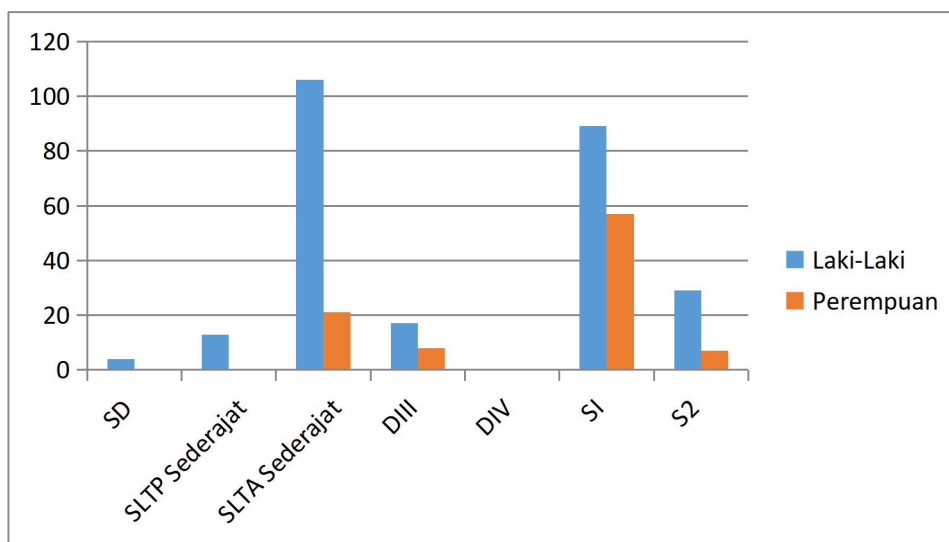
Pemetaan pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat berdasarkan tingkat pendidikan terakhirnya ditampilkan pada tabel berikut.

**Tabel 3.3 Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Berdasarkan tingkat pendidikan**

Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai		
	Laki-laki	Perempuan	Total
SD	4	-	4
SLTP Sederajat	13	-	13
SLTA Sederajat	106	21	127

Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai		
	Laki-laki	Perempuan	Total
DIII	17	8	25
DIV	-	-	-
S1	89	57	146
S2	29	7	36
Jumlah	258	93	351

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas PUPR



Gambar 3.2 Grafik Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019 berdasarkan Tingkat Pendidikan

### 3.2.3 Pemetaan Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

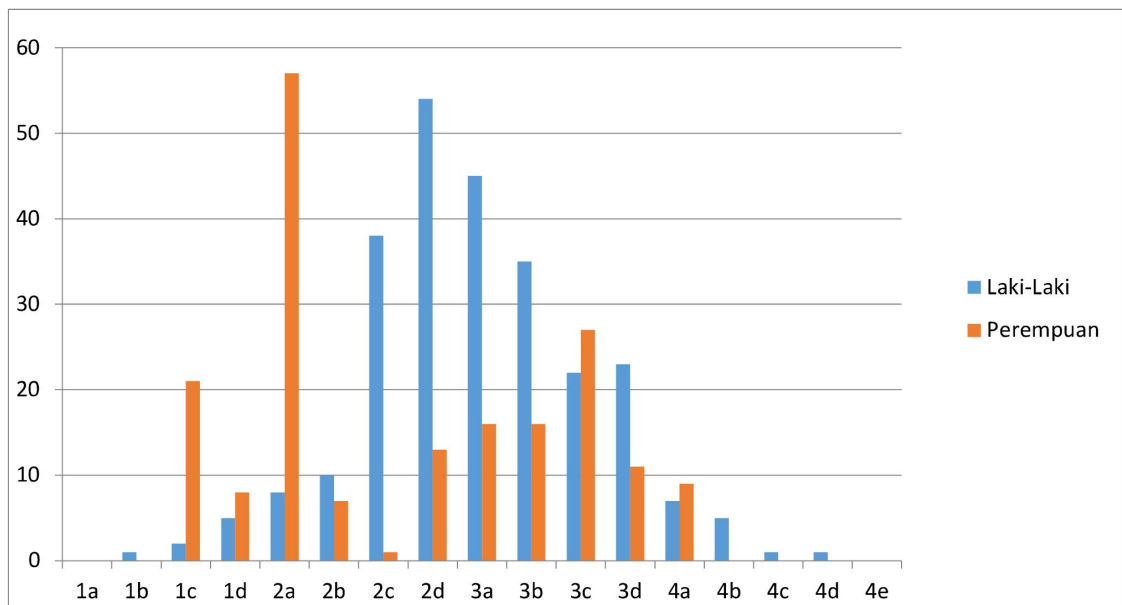
Pemetaan pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat berdasarkan pangkat/golongan ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 3.4 Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Berdasarkan pangkat/golongan

Golongan	Jumlah Pegawai		
	Laki-laki	Perempuan	Total
1A	-	-	-
1b	1	-	1
1c	2	-	2
1d	5	-	5
2a	8	1	9
2b	10	-	10
2c	38	1	39
2d	54	13	67
3a	45	16	61
3b	35	16	51
3c	22	27	49

Golongan	Jumlah Pegawai		
	Laki-laki	Perempuan	Total
3d	23	11	34
4a	7	9	16
4b	5	-	5
4c	1	-	1
4d	1	-	1
4e	-	-	-

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas PUPR



Gambar 3.3 Grafik Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Golongan Tahun 2019

### 3.2.4 Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

#### 3.2.4.1 Jumlah Pejabat Struktural

Dari struktur organisasi gambar 1.1 dapat dijelaskan bahwa formasi tenaga struktural pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2019 ada 52 formasi yang terdiri dari :

1. Kepala Dinas : Eselon II ( 1 orang )
2. Sekretaris : Eselon III ( 1 orang )
3. Kepala Bidang : Eselon III ( 3 orang )
4. Kepala UPTD : Eselon III ( 9 orang )
5. Kepala Seksi : Eselon IV ( 27 orang )
6. Kasubag : Eselon IV ( 11 orang )

#### 3.2.4.2 Jumlah Pejabat Fungsional

Pada tahun 2019 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang *tidak ada* Pejabat Fungsional.

3.3 Alokasi dan Realisasi Anggaran

**Tabel 3.5 Alokasi dan Realisasi Anggaran Program/Kegiatan  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumbar Tahun 2019**

KODE REKENING	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN Rp	REALISASI ANGGARAN Rp	SISA ANGGARAN Rp	%
1	2	3	4	5	6
5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>479,186,523,089.00</b>	<b>395,100,652,064.66</b>	<b>84,085,871,024.34</b>	<b>82.45</b>
<b>1.01.1.01.03.01.001</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>5,495,289,048.00</b>	<b>5,444,171,352.00</b>	<b>51,117,696.00</b>	<b>99.07</b>
001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7,500,000.00	7,497,760.00	2,240.00	99.97
002	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	1,722,649,000.00	1,711,864,324.00	10,784,676.00	99.37
003	Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor	2,071,303,848.00	2,047,960,291.00	23,343,557.00	98.87
008	Penyediaan Alat Tulis Kantor	180,000,000.00	179,973,970.00	26,030.00	99.99
009	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	150,000,000.00	149,555,210.00	444,790.00	99.70
010	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	30,000,000.00	29,934,297.00	65,703.00	99.78
013	Penyediaan Barang Bacaan dan Peraturan Per-UU	34,500,000.00	34,494,500.00	5,500.00	99.98
015	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Luar Daerah	1,046,986,200.00	1,036,124,741.00	10,861,459.00	98.96
017	Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi	252,350,000.00	246,766,259.00	5,583,741.00	97.79

**Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)**

<b>KODE REKENING</b>	<b>URAIAN KEGIATAN</b>	<b>JUMLAH ANGGARAN Rp</b>	<b>REALISASI ANGGARAN Rp</b>	<b>SISA ANGGARAN Rp</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>1.01.1.01.03.01.002</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>6,619,374,100.00</b>	<b>6,507,910,789.00</b>	<b>111,463,311.00</b>	<b>98.32</b>
002	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	392,202,800.00	386,818,100.00	5,384,700.00	98.63
005	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1,700,000,000.00	1,676,146,798.00	23,853,202.00	98.60
006	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	601,200,000.00	598,440,571.00	2,759,429.00	99.54
037	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1,148,150,000.00	1,134,490,000.00	13,660,000.00	98.81
361	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas/Mess	2,033,827,400.00	1,975,148,650.00	58,678,750.00	97.11
371	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	675,993,900.00	669,409,170.00	6,584,730.00	99.03
86	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor	68,000,000.00	67,457,500.00	542,500.00	99.20
<b>1.01.1.01.03.01.003</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>275,352,800.00</b>	<b>271,272,000.00</b>	<b>4,080,800.00</b>	<b>98.52</b>
001	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	275,352,800.00	271,272,000.00	4,080,800.00	98.52
<b>1.01.1.01.03.01.004</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>264,800,000.00</b>	<b>254,909,897.00</b>	<b>9,890,103.00</b>	<b>96.27</b>
001	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	264,800,000.00	254,909,897.00	9,890,103.00	96.27
<b>1.01.1.01.03.01.005</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>1,661,967,928.00</b>	<b>1,503,281,379.00</b>	<b>158,686,549.00</b>	<b>90.45</b>
001	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	270,806,000.00	234,089,105.00	36,716,895.00	86.44

**Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)**

<b>KODE REKENING</b>	<b>URAIAN KEGIATAN</b>	<b>JUMLAH ANGGARAN Rp</b>	<b>REALISASI ANGGARAN Rp</b>	<b>SISA ANGGARAN Rp</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
002	Penatausahaan Keuangan SKPD	999,260,000.00	925,317,742.00	73,942,258.00	92.60
003	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	184,714,000.00	166,180,062.00	18,533,938.00	89.97
005	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD	207,187,928.00	177,694,470.00	29,493,458.00	85.76
<b>1.01.03.1.01.03.01.032</b>	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN</b>	<b>184,577,512,989.00</b>	<b>154,051,894,972.06</b>	<b>30,525,618,016.94</b>	<b>83.46</b>
006	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Tapus - Muaro Sei.Lolo - Gelugur (P.101)	6,052,944,100.00	5,493,935,790.00	559,008,310.00	90.76
007	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Simp. Duku (Ketaping) - Pariaman (P.075)	1,476,078,000.00	1,473,436,400.00	2,641,600.00	99.82
010	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Palembang - Palupuh (Simp. Patai) (P.081)	3,182,085,200.00	3,181,122,933.00	962,267.00	99.97
011	Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Kantor Camat - Berkat (P.104)	3,294,320,000.00	3,239,248,400.00	55,071,600.00	98.33
013	Penyiapan Lahan Untuk Infrastruktur Bidang ke PU an	19,858,130,489.00	10,122,707,298.06	9,735,423,190.94	50.98
014	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Guguk Cino Sawahlunto (Lapangan Segitiga) (P.038)	5,843,480,900.00	5,840,652,251.00	2,828,649.00	99.95
015	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Sp. Ganting Payo - Batas Tanah Datar - Sumani (P.092)	3,206,813,800.00	3,195,376,565.00	11,437,235.00	99.64

**Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)**

<b>KODE REKENING</b>	<b>URAIAN KEGIATAN</b>	<b>JUMLAH ANGGARAN Rp</b>	<b>REALISASI ANGGARAN Rp</b>	<b>SISA ANGGARAN Rp</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
016	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Manggopoh - Padang Luar (P.025)	3,304,971,800.00	3,146,029,600.00	158,942,200.00	95.19
019	Kegiatan Monitoring dan Pengawasan Perizinan Utilitas Umum	67,100,000.00	47,062,278.00	20,037,722.00	70.14
021	Pembangunan Jembatan Kuranji Kota Padang	16,119,397,500.00	16,096,201,100.00	23,196,400.00	99.86
025	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Matur - Palembang (P.080)	2,813,726,600.00	2,811,680,350.00	2,046,250.00	99.93
031	Perencanaan Pembangunan Jembatan Provinsi	1,732,064,300.00	1,731,407,171.00	657,129.00	99.96
039	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Batas Batusangkar (Bukit Gombak) - Guguk Cino (P.037)	2,724,506,100.00	2,721,977,271.00	2,528,829.00	99.91
040	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Simancung - Tj.Ampalu (P. 007)	4,194,115,000.00	4,194,007,200.00	107,800.00	100.00
041	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Lubuk Basung - Sungai Limau (P.072)	2,569,784,200.00	2,567,011,842.00	2,772,358.00	99.89
042	Pembangunan Jembatan Batu Bala (P.086)	767,875,000.00	760,362,513.00	7,512,487.00	99.02
043	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Palupuh - Pua gadih - Koto Tinggi (P.090)	3,236,976,000.00	3,234,884,137.00	2,091,863.00	99.94
044	Pembangunan Jembatan Lolong (P. 099)	16,124,400,000.00	6,607,886,950.00	9,516,513,050.00	40.98
046	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Padang Koto Gadang - Palembang (P.088)	2,599,915,600.00	2,582,079,769.00	17,835,831.00	99.31



**Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)**

<b>KODE REKENING</b>	<b>URAIAN KEGIATAN</b>	<b>JUMLAH ANGGARAN Rp</b>	<b>REALISASI ANGGARAN Rp</b>	<b>SISA ANGGARAN Rp</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
049	Perencanaan Pembangunan Jalan Provinsi	4,271,605,300.00	4,268,121,483.00	3,483,817.00	99.92
052	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Batu Batembak - Pelabuhan Panasahan (P.100)	486,194,700.00	484,031,300.00	2,163,400.00	99.56
055	Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Jalan/Jembatan Provinsi	600,204,000.00	528,181,071.00	72,022,929.00	88.00
056	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073)	3,507,765,800.00	3,507,360,650.00	405,150.00	99.99
059	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Simp. Koto Baru - Tj. Simalidu (P.011)	1,000,000,000.00	990,089,400.00	9,910,600.00	99.01
060	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Abai Sangir - Sei.Dareh (P.056.3)	3,243,899,000.00	3,226,378,350.00	17,520,650.00	99.46
063	Updating Database Jalan Provinsi	603,843,500.00	597,505,089.00	6,338,411.00	98.95
064	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Jl. Lingkar Selatan (Payakumbuh) (P.084)	2,717,927,500.00	2,703,775,569.00	14,151,931.00	99.48
066	Peningkatan/Pembangunan Jalan Provinsi DAK (Pendamping)	50,486,625,000.00	40,645,170,462.00	9,841,454,538.00	80.51
067	Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Simp. Padang Aro - Lubuk Malako (P.056.1)	884,912,200.00	873,593,800.00	11,318,400.00	98.72
069	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Surantih - Kayu Aro - Langgai (P.086)	3,326,330,700.00	3,326,210,500.00	120,200.00	100.00

*Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)*

<b>KODE REKENING</b>	<b>URAIAN KEGIATAN</b>	<b>JUMLAH ANGGARAN Rp</b>	<b>REALISASI ANGGARAN Rp</b>	<b>SISA ANGGARAN Rp</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
070	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Duku - Sicincin (P.087)	6,292,471,900.00	6,275,246,006.00	17,225,894.00	99.73
072	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Kegiatan Jalan Dan Jembatan Provinsi Sumatera Barat	2,155,916,000.00	1,813,663,901.00	342,252,099.00	84.12
074	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Pangkalan Koto Baru-Sialang-Gelugur (P.076)	2,744,185,000.00	2,683,409,155.00	60,775,845.00	97.79
076	Pembangunan Jembatan Provinsi Wilayah II	2,927,247,800.00	2,927,247,800.00	0.00	100.00
077	Survey Pekerjaan Mendesak dan Bencana Alam	159,700,000.00	154,840,618.00	4,859,382.00	96.96
<b>1.01.03.1.01.03.01.033</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN</b>	<b>48,377,347,200.00</b>	<b>47,955,031,970.60</b>	<b>422,315,229.40</b>	<b>99.13</b>
001	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Rawang - Talawi	122,120,000.00	121,938,865.00	181,135.00	99.85
003	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Palembang - Palupuh (Sp.Patai)	303,900,000.00	302,215,225.00	1,684,775.00	99.45
004	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Guguk Cino - Sawahlunto	761,400,000.00	760,746,214.00	653,786.00	99.91
006	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Sp.Koto Baru - Tj. Simalidu	414,260,000.00	413,434,390.00	825,610.00	99.80
007	Pengadaan Peralatan dan Bahan Jalan dan Jembatan	3,465,000,000.00	3,264,180,799.60	200,819,200.40	94.20
008	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Bungo Tanjung -	58,580,000.00	58,245,130.00	334,870.00	99.43

**Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)**

<b>KODE REKENING</b>	<b>URAIAN KEGIATAN</b>	<b>JUMLAH ANGGARAN Rp</b>	<b>REALISASI ANGGARAN Rp</b>	<b>SISA ANGGARAN Rp</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
	Teluk Tapang - Bts. Sumut				
009	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Batas Kota Payakumbuh - Sitangkai	3,126,650,000.00	3,100,436,062.00	26,213,938.00	99.16
011	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Simancung - Tj. Ampalu	273,760,000.00	272,673,593.00	1,086,407.00	99.60
012	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Batu Batembak - Pelabuhan Panasahan	27,840,000.00	27,478,350.00	361,650.00	98.70
013	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Tapus - Muaro Sei. Lolo - Gelugur	896,080,000.00	895,645,359.00	434,641.00	99.95
014	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Jln Lingkar Selatan (Payakumbuh)	551,290,000.00	549,913,431.00	1,376,569.00	99.75
015	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Simpang Padang Aro - Lubuk Malako	466,400,000.00	465,928,902.00	471,098.00	99.90
017	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Palupuh - Puagaduh - Koto Tinggi	571,760,000.00	571,233,600.00	526,400.00	99.91
018	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Batusangkar - Ombilin	429,150,000.00	426,517,603.00	2,632,397.00	99.39
020	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Sp.Koto Baru - Junction	2,841,760,000.00	2,838,933,016.00	2,826,984.00	99.90

**Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)**

<b>KODE REKENING</b>	<b>URAIAN KEGIATAN</b>	<b>JUMLAH ANGGARAN Rp</b>	<b>REALISASI ANGGARAN Rp</b>	<b>SISA ANGGARAN Rp</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
022	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Manggopoh - Padang Luar	1,802,150,000.00	1,801,466,950.00	683,050.00	99.96
023	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Lubuk Basung - Sungai Limau	693,900,000.00	684,648,125.00	9,251,875.00	98.67
025	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Bts.Sitangkai - Tj. Ampalu	428,760,000.00	428,447,756.00	312,244.00	99.93
027	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Padang Sawah - Kumpulan	907,700,000.00	907,449,692.00	250,308.00	99.97
028	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Kubu Kerambil - Batusangkar	458,900,000.00	452,957,537.00	5,942,463.00	98.71
029	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Lubuk Malako - Abai Sangir	396,400,000.00	395,969,140.00	430,860.00	99.89
030	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Padang Koto Gadang - Palembang	744,600,000.00	742,419,100.00	2,180,900.00	99.71
031	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Singkarak - Aripau - Tj.Balit - Pdg Ganting	716,400,000.00	715,366,490.00	1,033,510.00	99.86
033	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Junction - Abai Siat	811,760,000.00	811,721,121.00	38,879.00	100.00
035	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Simpang Koto Mambang - Balingka	981,400,000.00	978,918,025.00	2,481,975.00	99.75

**Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)**

<b>KODE REKENING</b>	<b>URAIAN KEGIATAN</b>	<b>JUMLAH ANGGARAN Rp</b>	<b>REALISASI ANGGARAN Rp</b>	<b>SISA ANGGARAN Rp</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
036	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Sicincin - Kurai Taji	569,900,000.00	563,649,050.00	6,250,950.00	98.90
038	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Sijunjung - Tn. Badantung	306,760,000.00	306,224,509.00	535,491.00	99.83
039	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Inderapura - Muara Sakai	182,500,000.00	182,003,950.00	496,050.00	99.73
040	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Panti - Simpang Empat	2,246,030,000.00	2,244,501,847.00	1,528,153.00	99.93
041	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Baso - Batusangkar	686,150,000.00	684,544,615.00	1,605,385.00	99.77
042	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Solok - Alahan Panjang	1,353,900,000.00	1,352,597,540.00	1,302,460.00	99.90
043	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Sp.Napar - Bukit Bual - Tj.Ampalu	329,260,000.00	328,782,391.00	477,609.00	99.85
044	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Payakumbuh - Suliki - Koto Tinggi	2,087,170,000.00	2,086,305,603.00	864,397.00	99.96
045	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Pintu Angin - Lubuk Saiyo	73,560,000.00	73,457,980.00	102,020.00	99.86
046	Pemeliharaan Peralatan Jalan dan Jembatan	1,174,400,000.00	1,125,773,223.00	48,626,777.00	95.86

**Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)**

<b>KODE REKENING</b>	<b>URAIAN KEGIATAN</b>	<b>JUMLAH ANGGARAN Rp</b>	<b>REALISASI ANGGARAN Rp</b>	<b>SISA ANGGARAN Rp</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
047	Pengendalian Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan/Jembatan Provinsi	180,244,000.00	176,220,688.00	4,023,312.00	97.77
048	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Simpang Baso - Piladang	349,900,000.00	347,363,454.00	2,536,546.00	99.28
049	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Simpang Duku (Ketaping) - Pariaman	685,340,000.00	683,453,100.00	1,886,900.00	99.72
051	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Tj.Ampalu - Sijunjung	466,760,000.00	466,187,434.00	572,566.00	99.88
052	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Simp. SP II - Kantor Camat	218,800,000.00	217,162,237.00	1,637,763.00	99.25
053	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Simpang IV - Sasak	495,280,000.00	494,720,194.00	559,806.00	99.89
054	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Batusangkar - Guguk Cino	226,400,000.00	224,738,663.00	1,661,337.00	99.27
056	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Alahan Panjang - Kiliran Jao	667,650,000.00	666,980,510.00	669,490.00	99.90
057	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Pasar Baru - Alahan Panjang	517,400,000.00	516,688,050.00	711,950.00	99.86
058	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Rao - Rokan (Bts.Riau)	1,245,200,000.00	1,244,358,951.00	841,049.00	99.93

**Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)**

<b>KODE REKENING</b>	<b>URAIAN KEGIATAN</b>	<b>JUMLAH ANGGARAN Rp</b>	<b>REALISASI ANGGARAN Rp</b>	<b>SISA ANGGARAN Rp</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
059	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Pangkalan - Koto Baru - Sialang - Gelugur	1,638,950,000.00	1,637,213,633.00	1,736,367.00	99.89
060	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Sp Ganting Payo - Batas Solok - Sumani	681,400,000.00	680,800,680.00	599,320.00	99.91
061	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jembatan Propinsi Dan Bangunan Pelengkap Jalan	3,938,003,200.00	3,905,192,665.00	32,810,535.00	99.17
062	Penanganan Kritis dan Unit Layanan Gangguan Jalan dan Jembatan Provinsi (ULG)	1,052,800,000.00	1,013,600,666.00	39,199,334.00	96.28
063	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Matur - Palembang	488,900,000.00	486,358,500.00	2,541,500.00	99.48
064	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Teluk Bayur - Nipah - Purus	75,000,000.00	74,185,700.00	814,300.00	98.91
066	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Sp.Sikabau - Sp. Koto Baru	791,760,000.00	791,170,361.00	589,639.00	99.93
068	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Air Balam - Air Bangis	310,280,000.00	309,920,822.00	359,178.00	99.88
069	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Guguk Cino - Sitangkai	434,400,000.00	432,409,785.00	1,990,215.00	99.54
071	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Abai Sangir - Sungai Dareh	284,650,000.00	284,162,584.00	487,416.00	99.83

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

KODE REKENING	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN Rp	REALISASI ANGGARAN Rp	SISA ANGGARAN Rp	%
1	2	3	4	5	6
072	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Surantih - Kayu Aro - Langgai	1,763,900,000.00	1,763,429,750.00	470,250.00	99.97
073	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Talu - Lubuk - Sikaping	551,530,000.00	551,113,800.00	416,200.00	99.92
074	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Simpang Padang Karambia - Tj. Bungo	51,250,000.00	50,874,560.00	375,440.00	99.27
<b>1.01.03.1.01.03.01.034</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN</b>	<b>3,735,168,000.00</b>	<b>3,705,302,724.00</b>	<b>29,865,276.00</b>	<b>99.20</b>
001	Pengadaan Alat-alat Ukur dan Laboratorium Ke Bina Margaan	3,180,450,000.00	3,160,861,922.00	19,588,078.00	99.38
002	Monitoring Pengendalian Mutu UPTD	416,966,000.00	409,354,756.00	7,611,244.00	98.17
004	Pemeliharaan Alat-Alat Ukur Laboratorium Ke Binamargaan	137,752,000.00	135,086,046.00	2,665,954.00	98.06
<b>1.01.03.1.01.03.01.035</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>913,790,000.00</b>	<b>801,506,936.00</b>	<b>112,283,064.00</b>	<b>87.71</b>
003	Penyusunan Rencana Teknis Rinci (DED) Pengembangan TPA Sampah Regional Payakumbuh	242,550,000.00	227,090,850.00	15,459,150.00	93.63
005	Studi Kelayakan Pengembangan/Pemindahan TPA Sampah Regional Payakumbuh	224,898,000.00	205,028,783.00	19,869,217.00	91.17
008	Pendampingan Program Sanimas IDB dan PPSP	446,342,000.00	369,387,303.00	76,954,697.00	82.76



**Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)**

<b>KODE REKENING</b>	<b>URAIAN KEGIATAN</b>	<b>JUMLAH ANGGARAN Rp</b>	<b>REALISASI ANGGARAN Rp</b>	<b>SISA ANGGARAN Rp</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>1.01.03.1.01.03.01.0 36</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PBL DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>214,708,096,624.00</b>	<b>163,126,937,373.00</b>	<b>51,581,159,251.00</b>	<b>75.98</b>
002	Lokarkarya, Sosialisasi, Forum Komunikasi dan Informasi Bangunan Gedung	826,831,050.00	713,536,111.00	113,294,939.00	86.30
003	Pembangunan Gedung Inspektorat Provinsi Sumatera Barat	497,153,700.00	411,454,960.00	85,698,740.00	82.76
004	Pembangunan Gedung Kebudayaan Sumatera Barat (Lanjutan)	30,487,863,000.00	30,156,578,940.00	331,284,060.00	98.91
005	Rehabilitasi Bangunan Gedung Negara	1,203,118,000.00	1,197,808,600.00	5,309,400.00	99.56
007	Pembinaan dan Pengelolaan Teknis (TPT) Bangunan Negara di Sumatera Barat	206,144,000.00	168,808,900.00	37,335,100.00	81.89
009	Pembangunan Gedung Kantor PPIPTEK Provinsi Sumatera Barat	496,790,250.00	412,766,500.00	84,023,750.00	83.09
010	Pembangunan Gedung Utama Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat	113,244,500.00	106,688,950.00	6,555,550.00	94.21
013	Pembinaan Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG)	628,613,200.00	596,003,707.00	32,609,493.00	94.81
015	Pembangunan Gedung Convention Hall Sumatera Barat (Lanjutan)	1,581,482,530.00	1,578,942,030.00	2,540,500.00	99.84
016	Pembangunan Shelter Evakuasi Tsunami di Musholla Jabal Rahmah di Painan (lanjutan)	500,000,000.00	468,079,018.00	31,920,982.00	93.62
019	Assesmen Bangunan Gedung dan Sertifikasi Laik Fungsi Bangunan Gedung	555,563,750.00	285,422,918.00	270,140,832.00	51.38

**Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)**

<b>KODE REKENING</b>	<b>URAIAN KEGIATAN</b>	<b>JUMLAH ANGGARAN Rp</b>	<b>REALISASI ANGGARAN Rp</b>	<b>SISA ANGGARAN Rp</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
020	Pembangunan Gedung Bundo Kandung Provinsi Sumatera Barat	4,373,619,500.00	4,321,415,000.00	52,204,500.00	98.81
022	Pembangunan Lapangan Tenis Indoor Di Komplek Gubernururan (lanjutan)	146,646,950.00	113,762,160.00	32,884,790.00	77.58
025	Pembangunan Shelter Evakuasi Tsunami Linggarjati	3,926,518,700.00	3,924,558,300.00	1,960,400.00	99.95
026	Pendampingan Pembinaan Pengelolaan Rumah Negara di Sumatera Barat	171,766,000.00	160,316,433.00	11,449,567.00	93.33
027	Pembangunan Gedung Kantor Samsat Kota Padang	18,611,488,000.00	16,696,589,950.00	1,914,898,050.00	89.71
028	Pembangunan Stadium Utama Sumatera Barat (Lanjutan)	148,500,707,309.00	100,018,727,639.00	48,481,979,670.00	67.35
029	Pembangunan Guest House Gubernururan	976,156,000.00	974,600,700.00	1,555,300.00	99.84
030	Pembangunan Taman Wisata Kelok Sembilan	405,547,000.00	325,672,722.00	79,874,278.00	80.30
031	Penambahan Garase Rumah Dinas Gubernur	98,843,185.00	98,665,685.00	177,500.00	99.82
032	Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan	100,000,000.00	99,163,600.00	836,400.00	99.16
033	Dukungan Pelaksanaan MTQ Nasional	300,000,000.00	297,374,550.00	2,625,450.00	99.12
<b>1.01.03.1.01.03.01.0 37</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>773,788,000.00</b>	<b>605,953,577.00</b>	<b>167,834,423.00</b>	<b>78.31</b>
001	Lokakarya, Sosialisasi dan Forum Komunikasi Jasa Konstruksi	274,180,000.00	222,363,100.00	51,816,900.00	81.10
012	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Sumatera Barat	75,000,000.00	-	75,000,000.00	-
023	Bimbingan Teknis/Workshop Jasa Konstruksi	424,608,000.00	383,590,477.00	41,017,523.00	90.34

**Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)**

<b>KODE REKENING</b>	<b>URAIAN KEGIATAN</b>	<b>JUMLAH ANGGARAN Rp</b>	<b>REALISASI ANGGARAN Rp</b>	<b>SISA ANGGARAN Rp</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>1.01.03.1.01.03.01.0 38</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>4,733,380,000.00</b>	<b>4,090,939,998.00</b>	<b>642,440,002.00</b>	<b>86.43</b>
001	Peningkatan Pemahaman Pemangku Kepentingan Terhadap Penataan Ruang	129,180,000.00	92,222,400.00	36,957,600.00	71.39
003	Legalisasi RTR Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Metropolitan PASOPALAPA	1,064,378,000.00	784,969,750.00	279,408,250.00	73.75
004	Koordinasi Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Lintas Kab/Kota (TKPRD) Provinsi Sumatera Barat	357,406,000.00	315,982,278.00	41,423,722.00	88.41
006	Legalisasi RTR Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Mandeh Kab. Pesisir Selatan	597,616,000.00	489,523,441.00	108,092,559.00	81.91
009	Penyusunan Database ke PU an dan Tata Ruang Provinsi / Kabupaten / Kota (lanjutan)	1,615,160,000.00	1,500,950,893.00	114,209,107.00	92.93
011	Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Penataan Ruang	533,200,000.00	483,756,588.00	49,443,412.00	90.73
012	Penyebarluasan Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang	436,440,000.00	423,534,648.00	12,905,352.00	97.04
<b>1.01.03.1.01.03.01.0 39</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>424,759,000.00</b>	<b>410,989,119.00</b>	<b>13,769,881.00</b>	<b>96.76</b>
008	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi (UPT Balai Pengujian Konstruksi)	220,357,000.00	214,910,354.00	5,446,646.00	97.53

*Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)*

KODE REKENING	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN Rp	REALISASI ANGGARAN Rp	SISA ANGGARAN Rp	%
1	2	3	4	5	6
009	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi (UPT Workshop dan Peralatan)	204,402,000.00	196,078,765.00	8,323,235.00	95.93
<b>1.01.03.1.01.03.01.040</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SPAM LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1,638,277,400.00</b>	<b>1,478,956,569.00</b>	<b>159,320,831.00</b>	<b>90.28</b>
001	Pembinaan Kegiatan PAMSIMAS di Provinsi Sumatera Barat	157,350,000.00	148,848,150.00	8,501,850.00	94.60
002	Pembangunan SPAM Regional Kab.Solok dan Kota Solok	482,595,800.00	468,882,255.00	13,713,545.00	97.16
006	Pembangunan SPAM Regional Kab.Padang Pariaman dan Kota Pariaman	486,872,600.00	477,408,480.00	9,464,120.00	98.06
008	Pembangunan SPAM Kws Singgalang - Kota Pd. Panjang, Kab.Tanah Datar	100,000,000.00	3,972,000.00	96,028,000.00	3.97
011	Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Keciptakarya di Provinsi Sumatera Barat	311,459,000.00	280,535,284.00	30,923,716.00	90.07
013	Pengembangan SPAM Regional Kab. Agam - Bukittinggi (lanjutan)	100,000,000.00	99,310,400.00	689,600.00	99.31
<b>1.01.03.1.01.03.01.041</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DRAINASE KEWENANGAN PROVINSI</b>	<b>4,805,000,000.00</b>	<b>4,744,636,685.00</b>	<b>60,363,315.00</b>	<b>98.74</b>
001	Pembangunan Drainase Kota Bukittinggi - Kab. Agam (lanjutan)	100,000,000.00	97,839,800.00	2,160,200.00	97.84
002	Pembangunan Drainase Kab. Padang Pariaman	150,000,000.00	147,060,850.00	2,939,150.00	98.04
004	Pembangunan Drainase Kab. Solok dan Kota Solok	2,755,000,000.00	2,725,012,635.00	29,987,365.00	98.91

*Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)*

<b>KODE REKENING</b>	<b>URAIAN KEGIATAN</b>	<b>JUMLAH ANGGARAN Rp</b>	<b>REALISASI ANGGARAN Rp</b>	<b>SISA ANGGARAN Rp</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
005	Pembangunan Drainase Kab. 50 Kota dan Kota Payakumbuh	1,800,000,000.00	1,774,723,400.00	25,276,600.00	98.60
<b>042</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG</b>	<b>182,620,000.00</b>	<b>146,956,724.00</b>	<b>35,663,276.00</b>	<b>80.47</b>
001	Monitoring Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten / Kota	116,120,000.00	103,811,062.00	12,308,938.00	89.40
003	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat	66,500,000.00	43,145,662.00	23,354,338.00	64.88

### 3.4 Kondisi Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang ada pada Dinas PUPR tahun 2019 sudah mencukupi.

### 3.5 Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2019 pada prinsipnya capaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sangat baik. Akan tetapi masih terdapat beberapa permasalahan dalam proses pelaksanaannya antara lain :

1. Terdapat kegiatan yang pelaksanaannya melewati tahun anggaran 2019 sebagai berikut :

NO	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Penyedia Barang/ Jasa	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)	Alasan di perpanjang
1	Pembangunan Gedung SAMSAT Kota Padang	19,974,631,000	PT. Hasmah Mat tujuh tujuh,	94.203	94.2	Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan Lewat Tahun Anggaran dengan alasan keterlambatan tender, mobilisasi material terlambat dan kelalaian kontraktor dalam memmanagement waktu pelaksanaan kegiatan.
2	Pembangunan Stadium Utama Sumatera Barat Tahap V	168,314,715,000	PT. Bangun Cipta Kontraktor, PT Brantas Abipraya Persero	60.58	60.58	Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan Lewat Tahun Anggaran dengan alasan keterlambatan tender, lambatnya produksi atap space, mobilisasi material terganggu karena ada konflik antara masyarakat dan kelalaian kontraktor dalam memmanagement waktu pelaksanaan kegiatan.

**Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)**

NO	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Penyedia Barang/ Jasa	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)	Alasan di perpanjang
3	Pembangunan Jembatan Lolong	19,194,605,000	PT. Cahya Tunggal Abadi, 630/12/KT R-BM/2019, 28 Mei 2019	57.43	60.46	Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan Lewat Tahun Anggaran dengan alasan keterlambatan tender, persoalan akses jalan ke lokasi , Jebolnya Cek Dam/Tanggul Pengaman Pekerjaan Jembatan Akibat Abrasi Sepanjang Pantai Padang Sehingga Akitifitas Terhenti ± 10 Hari Kalender, Pada abutment 1 (kec. padang barat) pelaksanaan pekerjaannya hanya dapat dilakukan sampai jam 3 sore karena dilarang oleh masyarakat berdagang/lahan parkir dengan alasan mereka mencari makan, dan itu dgn syarat harus separoh-separoh digali & material pengganti sudah ditumpuk
4	Paket Pembangunan Jalan Bungo Tanjung-Teluk Tapang DAK Kab. Pasaman Barat	6,753,948,000	CV. ARG CAHAYA NUSANTAR A, 620/138/K TR-BM/2019, 11 Juli 2019	94.33	96.18	Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan Lewat Tahun Anggaran dengan alasan cuaca dan akses ke lokasi curah hujan yang tinggi menyebabkan permukaan badan jalan menjadi licin sehingga kendaraan tidak bisa membawa material ke lokasi pekerjaan, hal itu juga menyebabkan terjadinya keterlambatan pada penghamparan dan pepadatan material
5	Paket Pembangunan	6,509,536,000	CV.INOCI, 620/72/KT	90.06	98.74	Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan Lewat

**Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)**

NO	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Penyedia Barang/ Jasa	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)	Alasan di perpanjang
	Jalan Tapus-Muara Sei Lolo-Gelugur		R-BM/2019, 14 Juni 2019			Tahun Anggaran dengan alasan cuaca, kelalaian kontraktor
6	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Jalan Simpang Padang Aro-Sei Dareh (1)	450,000,000	PT. TRI UNGGUL KONSULTAN, 620/162/K TR-PRC-BM/2019, 6 Agustus 2019	73.50	73.50	Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan Lewat Tahun Anggaran, dengan alasan jadwal tim tenis LH yg menyebabkan keterlambatan, sudah cek lapangan, tinggal rapat tim teknis dokling. Persetujuan KA Andal belum diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi.
7	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Jalan Pangkalan Koto Baru Tapus (2)	500,000,000	PT. GEO ENVIRO ABADI, 620/165/K TR-PRC-BM/2019, 6 Agustus 2019	79.01	79.01	Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan Lewat Tahun Anggaran, dengan alasan jadwal tim tenis LH yg menyebabkan keterlambatan, sudah cek lapangan, tinggal rapat tim teknis dokling. perbaikan KA Amdal belum diselesaikan dan belum diserahkan ke Komisi Penyusunan Amdal (KPA) Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pasaman, sehingga KA Andal belum disetujui oleh Dinas Lingkungan Hidup.
8	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Jalan Palupuh-Pua Gadih-Koto Tinggi (3)	250,000,000	CV. Nabel Engineering Consultant 620/176/K TR-PRC-BM/2019, 21 Agustus 2019	65.93	65.93	Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan Lewat Tahun Anggaran, dengan alasan jadwal tim tenis LH yg menyebabkan keterlambatan, sudah cek lapangan, tinggal rapat tim teknis dokling. Dokumen lingkungan yang



NO	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Penyedia Barang/ Jasa	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)	Alasan di perpanjang
						diserahkan oleh Konsultan CV. Nabel Engineering Consultant, baru berupa draft/konsep. Dokumen ini dibahas & diperiksa oleh Dinas LH Provinsi terlebih dahulu, dan diberikan masukan, saran dan perbaikan, melalui rapat koordinasi dengan OPD terkait di Provinsi dan OPD Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Agam.

2. Beberapa kegiatan yang realisasinya dibawah 90 % antara lain :

Dalam penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019 masih ditemui kendala dan permasalahan. Secara garis besar dari 167 kegiatan yang ada pada tahun 2019, pelaksanaannya sudah sesuai target yang telah ditetapkan. Namun ada beberapa kegiatan yang memiliki realisasi pencapaian target dibawah 90 % seperti ditampilkan pada tabel 3.6.

Tabel 3.6 Kegiatan Dengan Realisasi di bawah 90%

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
		ANGGARAN	ANGGARAN		
		Rp	Rp	Rp	
1	2	3	4	5	6
I	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	1,661,967,928.00	1,503,281,379.00	158,686,549.00	90.45
1	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	270,806,000.00	234,089,105.00	36,716,895.00	86.44
2	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	184,714,000.00	166,180,062.00	18,533,938.00	89.97
3	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD	207,187,928.00	177,694,470.00	29,493,458.00	85.76
II	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	184,577,512,989.00	154,051,894,972.06	30,525,618,016.94	83.46
1	Penyiapan Lahan Untuk Infrastruktur Bidang ke PU an	19,858,130,489.00	10,122,707,298.06	9,735,423,190.94	50.98
2	Kegiatan Monitoring dan Pengawasan Perizinan Utilitas Umum	67,100,000.00	47,062,278.00	20,037,722.00	70.14
3	Pembangunan Jembatan Lolong (P. 099)	16,124,400,000.00	6,607,886,950.00	9,516,513,050.00	40.98
4	Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Jalan/Jembatan Provinsi	600,204,000.00	528,181,071.00	72,022,929.00	88.00
5	Peningkatan/Pembangunan Jalan Provinsi DAK (Pendamping)	50,486,625,000.00	40,645,170,462.00	9,841,454,538.00	80.51
6	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Kegiatan Jalan Dan Jembatan Provinsi	2,155,916,000.00	1,813,663,901.00	342,252,099.00	84.12
III	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	913,790,000.00	801,506,936.00	112,283,064.00	87.71
1	Pendampingan Program Sanimas IDB dan PPSP	446,342,000.00	369,387,303.00	76,954,697.00	82.76
IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN PBL DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	214,708,096,624.00	163,126,937,373.00	51,581,159,251.00	75.98
1	Lokakarya, Sosialisasi, Forum Komunikasi dan Informasi Bangunan Gedung	826,831,050.00	713,536,111.00	113,294,939.00	86.30
2	Pembangunan Gedung Inspektorat Provinsi Sumatera Barat	497,153,700.00	411,454,960.00	85,698,740.00	82.76
3	Pembinaan dan Pengelolaan Teknis (TPT) Bangunan Negara di Sumatera Barat	206,144,000.00	168,808,900.00	37,335,100.00	81.89
4	Pembangunan Gedung Kantor PPIPTTEK Provinsi Sumatera Barat	496,790,250.00	412,766,500.00	84,023,750.00	83.09
5	Assesmen Bangunan Gedung dan Sertifikasi Laik Fungsi Bangunan Gedung	555,563,750.00	285,422,918.00	270,140,832.00	51.38
6	Pembangunan Lapangan Tennis Indoor Di Komplek Gubernur (lanjutan)	146,646,950.00	113,762,160.00	32,884,790.00	77.58
7	Pembangunan Gedung Kantor Samsat Kota Padang	18,611,488,000.00	16,696,589,950.00	1,914,898,050.00	89.71
8	Pembangunan Stadium Utama Sumatera Barat (Lanjutan)	148,500,707,309.00	100,018,727,639.00	48,481,979,670.00	67.35
9	Pembangunan Taman Wisata Kelok Sembilan	405,547,000.00	325,672,722.00	79,874,278.00	80.30
V	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	773,788,000.00	605,953,577.00	167,834,423.00	78.31
1	Lokakarya, Sosialisasi dan Forum Komunikasi Jasa Konstruksi	274,180,000.00	222,363,100.00	51,816,900.00	81.10
2	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Sumatera Barat	75,000,000.00	-	75,000,000.00	-
VI	PROGRAM PERENCANAAN PENATAAN RUANG	4,733,380,000.00	4,090,939,998.00	642,440,002.00	86.43
1	Peningkatan Pemahaman Pemangku Kepentingan Terhadap Penataan Ruang	129,180,000.00	92,222,400.00	36,957,600.00	71.39
2	Legalisasi RTR Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Metropolitan PASOPALAPA	1,064,378,000.00	784,969,750.00	279,408,250.00	73.75
3	Koordinasi Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Lintas Kab/Kota (TKPRD) Provinsi Sumatera Barat	357,406,000.00	315,982,278.00	41,423,722.00	88.41
4	Legalisasi RTR Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Mandeh Kab. Pesisir Selatan	597,616,000.00	489,523,441.00	108,092,559.00	81.91
VII	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SPAM LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,638,277,400.00	1,478,956,569.00	159,320,831.00	90.28
1	Pembangunan SPAM Kws Singgalang - Kota Pd. Panjang, Kab.Tanah Datar	100,000,000.00	3,972,000.00	96,028,000.00	3.97
VIII	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	182,620,000.00	146,956,724.00	35,663,276.00	80.47
1	Monitoring Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten / Kota	116,120,000.00	103,811,062.00	12,308,938.00	89.40
2	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	66,500,000.00	43,145,662.00	23,354,338.00	64.88

Adapun penyebab rendahnya pencapaian target masing – masing kegiatan yang dimaksud pada Tabel 2.12 beserta solusinya adalah sebagai berikut :

### 1. *Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD*

*Penyebabnya* adalah keterbatasan ketersediaan kendaraan dinas untuk operasional ke lapangan mensurvey kegiatan yang diusulkan pada perubahan dan dianggarkan pada APBD 2020, sehingga serapan biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah tidak optimal sesuai rencana.

*Solusinya* adalah dengan menganggarkan pengadaan kendaraan dinas untuk operasional ke lapangan pada APBD 2020.

Adapun penyebab rendahnya pencapaian target masing – masing kegiatan yang dimaksud pada Tabel 2.12 beserta solusinya adalah sebagai berikut :

**2. *Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD***

*Penyebabnya* adalah keterbatasan ketersediaan kendaraan dinas untuk operasional ke lapangan mensurvey kegiatan yang diusulkan pada perubahan dan dianggarkan pada APBD 2020, sehingga serapan biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah tidak optimal sesuai rencana.

*Solusinya* adalah dengan menganggarkan pengadaan kendaraan dinas untuk operasional ke lapangan pada APBD 2020.

**3. *Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD***

*Penyebabnya* adalah keterbatasan ketersediaan kendaraan dinas untuk operasional ke lapangan, sehingga serapan biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah tidak optimal sesuai rencana.

*Solusinya* adalah dengan menganggarkan pengadaan kendaraan dinas untuk operasional ke lapangan pada APBD 2020.

**4. *Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD***

*Penyebabnya* adalah keterbatasan ketersediaan kendaraan dinas untuk operasional ke lapangan memonitoring kegiatan-kegiatan fisik dilaksanakan pada tahun 2019, sehingga serapan biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah tidak optimal sesuai rencana.

*Solusinya* adalah dengan menganggarkan pengadaan kendaraan dinas untuk operasional ke lapangan pada APBD 2020.

**5. *Penyiapan Lahan Untuk Infrastruktur Bidang ke PU an***

*Penyebabnya :*

Penyerapan Dana rendah karena kendala permasalahan lahan sebagai berikut :

- a.) Abdulrahman** pemilik lahan pada Oprit Jembatan I, Sudah setuju dengan Nilai Appraisal yaitu sebesar Rp. 1.429.800.000,- akan tetapi Abdulrahman tersebut digugat oleh pihak kaumnya sehingga berperkara di Pengadilan.
- b.) Erni** pemilik lahan pada Oprit Jembatan II tidak setuju sama sekali dan tidak mau menerima undangan rapat, sehingga tidak didapati koordinasi yang jelas. Dan Erni ini menetap di daerah Bogor. Menurut Ketua Panitia dari Badan

Pertanahan Kota Padang ini akan di Konsinyasi ke Pengadilan dengan nilai Sebesar Rp. 783.000.000,-.

c.) **Endarfi Datuk Tanali** pemilik lahan menuju jalan Dr. M.Hatta. Mereka tidak setuju dengan nilai Appraisal dan tanahnya dibuat 3 zona, sehingga mereka tidak setuju dengan nilai Appraisal sebesar Rp. 4.545.500.000,-. Sekarang mereka mengajukan keberatan kepada Ketua Panitia dan Konsultan Penilai Appraisal.

Ketiga pemilik lahan ini dikonsinyasi ke Pengadilan Negeri Padang oleh Ketua Tim Pengadaan Lahan.

#### **Pengadaan Lahan Duku – Sicincin**

Pemilik lahan atas nama **Renoani** di gugat oleh kaumnya di Pengadilan Negeri Pariaman termasuk Dinas PUPR Provinsi Sumatera Barat oleh **HK. Dt. Tampang Hulu** pada tanggal 26 September 2019 dengan Nomor Perdata 56/Pdt.G/2019/PN.PRM. Sehingga dibuatkan Perjanjian akan dibayarkan pada Anggaran Tahun 2020.

#### **Pengadaan Lahan Teluk Kabung Mandeh**

Beberapa orang yang datanya belum lengkap disebabkan sertifikatnya tergadaikan di Bank, antara lain:

1. **No Name** total nilai sebesar Rp. 45.439.583,- ini digugat oleh orang yang berhak pula untuk menerima Ganti Kerugian.
2. **Trisnawati** total nilai sebesar Rp. 647.595,- ini sertifikatnya tergadaikan di Bank BRI.
3. **Nurleli** total nilai sebesar Rp. 7.647.413,- ini sertifikatnya tergadaikan di Bank.
4. **Susi Nirta** total nilai sebesar Rp. 3.143.205,- ini sertifikatnya tergadaikan di Bank.

#### **6. Kegiatan Monitoring dan Pengawasan Perizinan Utilitas Umum**

*Penyebabnya :*

Keterbatasan jumlah kendaraan operasional dinas dalam melakukan perjalanan dinas untuk melakukan monitoring dan pengawasan pekerjaan.

*Solusinya* adalah dengan menganggarkan pengadaan kendaraan dinas untuk operasional ke lapangan pada APBD 2020

#### **7. Pembangunan Jembatan Lolong (P. 099)**

*Penyebabnya* adalah :

- Jebolnya Cek Dam/Tanggul Pengaman Pekerjaan Jembatan Akibat Abrasi Sepanjang Pantai Padang Sehingga Akitifitas Terhenti ± 10 Hari Kalender

- Pada abutment 1 (kec. padang barat) pelaksanaan pekerjaannya hanya dapat dilakukan sampai jam 3 sore karena dilarang oleh masyarakat berdagang/lahan parkir dengan alasan mereka mencari makan, dan itu dengan syarat harus separoh-separoh digali dan material pengganti sudah ditumpuk

*Solusinya* adalah menambah waktu pelaksanaan kegiatan melewati tahun anggaran sehingga diharapkan pada masa akhir waktu perpanjangan pekerjaan bisa selesai sesuai rencana.

#### **8. *Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Jalan/Jembatan Provinsi***

*Penyebab* rendahnya serapan adalah perencanaan awal kegiatan TP4D ada 3 Paket kegiatan, masing-masing pertemuan ada narasumber 6 orang untuk dilaksanakan sebanyak 3 kali pertemuan, tetapi dalam pelaksanaannya pertemuan tersebut bisa digabung dalam satu kali pertemuan untuk 3 paket kegiatan. Masukan dari Tim TP4D bahwa kegiatan TP4D cukup dengan memberikan laporan bulanan, anggaran yang telah dianggarkan jadi tidak terlaksana.

#### **9. *Peningkatan/Pembangunan Jalan Provinsi DAK (Pendamping)***

*Penyebab* rendahnya serapan adalah curah hujan yang tinggi menyebabkan permukaan badan jalan menjadi licin sehingga kendaraan tidak bisa membawa material ke lokasi pekerjaan, hal itu juga menyebabkan terjadinya keterlambatan pada penghamparan dan pemadatan material lainnya.

*Solusinya* adalah mempercepat progres pelaksanaan dilapangan.

#### **10. *Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Kegiatan Jalan Dan Jembatan Provinsi Sumatera Barat***

*Penyebabnya* adalah :

- Paket 1 Penyusunan Dokumen Lingkungan Jalan Simpang Padang Aro – Sei Dareh Persetujuan KA Andal belum diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi (menurut Jadwal pada KAK seharusnya paling lambat tanggal 4 November 2019). Dengan demikian, Pekerjaan Paket 1 Penyusunan Dokumen Lingkungan Jalan Padang Aro – Sei Dareh, akan melewati Tahun Anggaran 2019.
- Paket 2 Penyusunan Dokumen Lingkungan Jalan Pangkalan Koto Baru – Tapus melewati Tahun Anggaran 2019, dengan alasan perbaikan KA Amdal belum diselesaikan dan belum diserahkan ke Komisi Penyusunan Amdal (KPA) Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pasaman, sehingga KA Andal belum disetujui oleh Dinas

Lingkungan Hidup. Dengan demikian maka Dokumen Andal – RKL – RPL belum bisa disusun. Selain itu survei usulan revisi PIPPIB terhadap trase jalan yang melalui Kawasan Hutan Lindung belum dilaksanakan karena sejak tanggal 25 Oktober 2019, penanganan terhadap Survei Kawasan Hutan terhadap area yang masuk kedalam PIPPIB harus ke Kementrian LHK (sebelumnya melalui Dinas Kehutanan Provinsi).

- Paket 3 Penyusunan Dokumen Lingkungan Jalan Palupuh - Pua Gadih - Kototinggi melewati Tahun Anggaran. Dokumen lingkungan yang diserahkan oleh Konsultan CV. Nabel Engineering Consultant, baru berupa draft/konsep. Dokumen ini harus dibahas dan diperiksa oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi terlebih dahulu, dan diberikan masukan, saran dan perbaikan, melalui rapat koordinasi dengan OPD terkait di Provinsi dan OPD Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Agam.

**11. *Pendampingan Program Sanimas IDB dan PPSP***

Penyebabnya adalah efisiensi anggaran karena keterbatasan kendaraan operasional.

**12. *Lokakarya, Sosialisasi, Forum Komunikasi dan Informasi Bangunan Gedung***

*Penyebabnya* adalah Deviasi di Kegiatan TABG sebanyak 5.19% dikarenakan adanya sisa perjalanan dinas Tim yang tidak terealisasi. Deviasi di Kegiatan Lokakarya sebanyak 13.70% dikarenakan biaya transportasi narasumber pusat tidak terealisasi karena narasumber pusat menggunakan biaya perjalanan dinas sendiri berupa uang harian tiket pesawat dan taksinya. *Solusinya* meninjau ulang penganggaran untuk kegiatan ini pada tahun berikutnya.

**13. *DED Pembangunan Gedung Inspektorat Provinsi Sumatera Barat***

*Penyebabnya* adalah menurut Permen PU No. 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, pembayaran biaya perencanaan teknis didasarkan pada pencapaian prestasi atau kemajuan perencanaan setiap tahapan (6 tahap) dan kegiatan ini baru sampai pada tahapan penyusunan RKS & RAB, masih tersisa 2 tahapan lagi yaitu Tahap pelelangan penyedia jasa pelaksana konstruksi dan tahap pengawasan berkala.

**14. *Pembinaan dan Pengelolaan Teknis (TPT) Bangunan Negara di Sumatera Barat***

*Penyebabnya* adalah :

1. Honor Sekretariat PTP dibayar mulai bulan Maret (dalam DPA Januari).
2. Honor Kepala Dinas tidak bisa dibayarkan karena sudah maksimal.

**15. *DED Pembangunan Gedung Kantor PPIPTEK Provinsi Sumatera Barat***

*Penyebabnya* adalah menurut Permen PU No. 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, pembayaran biaya perencanaan teknis didasarkan pada pencapaian prestasi atau kemajuan perencanaan setiap tahapan dan kegiatan ini baru sampai pada tahapan penyusunan RKS & RAB, masih tersisa 2 tahapan lagi yaitu Tahap pelelangan penyedia jasa pelaksana konstruksi dan tahap pengawasan berkala.

**16. *Assesmen Bangunan Gedung dan Sertifikasi Laik Fungsi Bangunan Gedung***

*Penyebabnya* adalah deviasi dikegiatan Asesment dan SLF sebanyak 48.62% dikarenakan adanya SLF 4 Bangunan yang belum dapat direalisasikan karena SLF Pusat sangat padat dan bangunan yang akan dijadikan sasaran SLF tidak bersedia dilaksanakan (Gedung Hotel dan Kantor).

**17. *Pembangunan Gedung Kantor Samsat Kota Padang***

*Penyebabnya* adalah mobilisasi material terlambat dan kelalaian kontraktor dalam manajemen waktu pelaksanaan kegiatan.

**18. *Pembangunan Stadium Utama Sumatera Barat (Lanjutan)***

*Penyebabnya* adalah lambatnya produksi atap space, mobilisasi material terganggu dan kelalaian kontraktor dalam manajemen waktu pelaksanaan kegiatan.

**19. *Pembangunan Taman Wisata Kelok Sembilan***

*Penyebabnya* adalah Koordinasi pada akhir tahun dengan BKSDA tidak terealisasi karena kegiatan fisik lanjutan ada yang mendesak sehingga fokus beralih ke kegiatan tersebut. Akibatnya dana koordinasi dengan BKSDA tidak terserap.

**20. *Lokakarya, Sosialisasi dan Forum Komunikasi Jasa Konstruksi***

*Penyebabnya* adalah narasumber pusat untuk sosialisasi keciptakaryaan berhalangan hadir sehingga digantikan dengan narasumber daerah sehingga serapan dana untuk tiket pesawat tidak dibayarkan. Untuk pelatihan K3 Honor dan tiket pesawat narasumber ditanggung oleh Balai Aceh sehingga serapan dana kegiatan yang ada di Provinsi menjadi rendah.

**21. *Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Sumatera Barat***

*Penyebabnya* adalah Instansi yang akan membantu Survey Kepuasan Masyarakat seperti UNP dan UNAND telah memiliki kontrak kerja dengan SKPD lain yang cukup padat pada tahun 2019 sehingga tidak bisa membantu pelaksanaan kegiatan yang dimaksud di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat. *Solusinya* adalah meninjau ulang apakah kegiatan ini masih perlu dianggarkan pada tahun berikutnya atau tidak mengingat tingkat efektifitas kegiatan ini.

**22. *Peningkatan Pemahaman Pemangku Kepentingan Terhadap Penataan Ruang***

Penyebab rendahnya serapan anggaran adalah sulitnya mengundang narasumber sesuai kebutuhan, dari 4 narasumber pusat yang hadir cuma 1-2 orang karena padatnnya jadwal narasumber yang bersangkutan.

**23. *Legalisasi RTR Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Metropolitan PASOPALAPA***

*Penyebabnya* rendahnya serapan adalah :

1. Penyempurnaan Materi Teknis RTR KSP Metropolitan PASOPALAPA
  - Perubahan Deliniasi Kawasan Metropolitan PASOPALAPA (Painan, Solok, Padang, Lubuk Alung dan Pariaman) menjadi PALAPA (Padang, Lubuk Alung, Pariaman) hal ini disebabkan karena kawasan PASOPALAPA tidak terintegrasi karena terdapat hutan lindung diantara perbatasan Kota Padang dan Kabupaten Solok dan Painan belum dikategorikan sebagai perkotaan
  - Perubahan Deliniasi kawasan yang tertuang dalam PP nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang direvisi menjadi PP Nomor 13 Tahun 2017 bahwa PALAPA dinyatakan sebagai pusat kegiatan nasional (PKN)
  - Kawasan Metropolitan PALAPA juga ditetapkan menjadi kawasan strategis provinsi dalam Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat
  - Akibat dari perubahan deliniasi yang diakibatkan oleh alasan tersebut diatas, maka materi teknis RTR KSP Kawasan Metropolitan PASOPALAPA perlu direvisi kembali sesuai dengan deliniasi kawasan



PALAPA.

2. Penyusunan naskah akademis dan ranperda RTR KSP kawasan metropolitan PASOPALAPA
    - Pembahasan RTR Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Metropolitan PASOPALAPA dijadwalkan oleh Biro Hukum pada Tahun 2020 sehingga proses legalisasi belum bias terlaksana pada tahun ini
    - Akibat belum terlaksananya proses legalisasi, maka studi banding Ranperda RTR Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Metropolitan PASOPALAPA dan Koordinasi serta konsultasi dengan Kementerian dan stakeholder terkait belum dilaksanakan
  3. Pemutakhiran Peta Dasar, Peta Tematik, Peta Rencana RTR KSP Kawasan Metropolitan PASOPALAPA
    - Perubahan Deliniasi Kawasan Metropolitan PASOPALAPA menjadi PALAPA mengakibatkan perlunya revisi Peta Dasar , Peta Tematik dan Peta Rencana
  4. Konsultasi Publik RTR KSP Kawasan Metropolitan PASOPALAPA  
Konsultasi Publik dijadwalkan sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi karena pembahasan di Biro Hukum dan DPRD ditunda pada tahun 2020, maka konsultasi publik ke 2 (dua) tidak jadi dilaksanakan.
- 24. *Koordinasi Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Lintas Kab/Kota (TKPRD) Provinsi Sumatera Barat***  
*Penyebabnya* rendahnya serapan adalah :
1. Belanja akomodasi dan transportasi narasumber pusat tidak terserap maksimal karena ketersediaan/keterbatasan jumlah narasumber pusat dalam memenuhi permintaan kesediaan menjadi narasumber
  2. Belanja vakasi yang dianggarkan untuk jumlah anggota TKPRD pada saat pembahasan dokumen rencana tata ruang tidak terserap maksimal dikarenakan jumlah anggota TKPRD yang hadir pada saat pembahasan tidak memenuhi kuota jumlah undangan anggota TKPRD
- 25. *Legalisasi RTR Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Mandeh Kab. Pesisir Selatan***

*Penyebabnya* rendahnya serapan adalah Perjalanan Dinas mendampingi studi banding belum dilaksanakan karena Ranperda RTR KSP Mandeh belum dibahas pada tahun ini, namun secara fisik pelaksanaan telah selesai 100%.

**26. *Pembangunan SPAM Kws Singgalang - Kota Pd. Panjang, Kab.Tanah Datar***

*Penyebabnya* rendahnya serapan adalah :

1. Sumber air baku yang ada terdapat kawasan hutan lindung dan sampai akhir tahun 2019 masih dalam proses pengurusan
2. Masih terdapat jalur pipa distribusi yang lahannya belum bebas

*Solusinya* adalah tetap berkoordinasi dengan masyarakat dan stakeholder setempat.

**27. *Monitoring Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten / Kota***

*Penyebabnya* rendahnya serapan adalah keterbatasan ketersediaan kendaraan dinas untuk operasional ke lapangan memonitoring kegiatan-kegiatan fisik dilaksanakan pada tahun 2019, sehingga serapan biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah tidak optimal sesuai rencana.

*Solusinya* adalah dengan menganggarkan pengadaan kendaraan dinas untuk operasional ke lapangan pada APBD 2020.

**28. *Pengawasan Pemanfaatan Ruang Oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat***

*Penyebabnya* adalah

1. Sisa dari bahan belanja habis pakai
2. Belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 17.056.000 tidak dapat direalisasikan

## BAB 4. TUGAS PEMBANTUAN

Pada tahun 2019, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat menerima tugas pembantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat . Amanat tersebut telah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat. Hal itu ditunjukkan dengan telah dilakukannya penyusunan penetapan kinerja Satuan Kerja Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat. Supaya rencana/target capaian kinerja yang ditetapkan di penetapan kinerja dapat terukur dengan susunan indikator kinerja yaitu indikator *output* maupun *outcome*. Indikator tersebut mengacu pada program dan sasaran/kegiatan yang merupakan komitmen Satuan Kerja Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat untuk dicapai dalam tahun 2019.

### 4.1 Dasar Hukum

Pelaksanaan tugas pembantuan ini berdasarkan pada :

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang No.12 Tahun 2018 tentang APBN TA 2019.

### 4.2 Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Tugas pembantuan ini diberikan oleh :

Rincian	Kode	Keterangan
Kementerian/lembaga	033	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Unit Organisasi	04	Ditjen Bina Marga
Provinsi	08	Sumatera Barat
Kode>Nama Satker	089258	Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat

#### 4.3 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan

Amanat tugas pembantuan ini dilaksanakan oleh Satuan Kerja Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat. Komponen penetapan kinerja Satuan Kerja Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019 dapat dijelaskan meliputi hal-hal sebagai berikut :

- Program, dalam penyusunan penetapan kinerja, program dikaitkan dengan program penganggaran dalam DIPA dan mengacu kepada sasaran/kegiatan Renstra 2015-2019.
- Sasaran, sesuai dengan yang dimuat dalam Review Renstra Direktorat Jenderal Pekerjaan Umum, pada perjanjian kinerja Satuan Kerja Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat tahun 2019, sasaran programnya adalah meningkatnya konektivitas jalan nasional. Sasaran dan Kegiatan merupakan penjabaran dari tugas dan fungsi (tusi) dari Satuan Kerja Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung tercapainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Indonesia 2015 - 2019.
- Kegiatan, sebagaimana dicantumkan dalam DIPA Satuan Kerja Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat bahwa kegiatan merupakan basis satuan kinerja yang terkecil dari kegiatan pokok, sasaran maupun program dimana kinerja yang direncanakan harus disesuaikan dengan tingkat pencapaian dari suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

#### 4.4 Program dan Kegiatan yang diterima dan pelaksanaannya

<b>1</b>	<b>Program</b>	<b>Penyelenggaraan Jalan</b>
	Sasaran Program	Meningkatnya konektivitas jalan nasional
	Output Program	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional
<b>2</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Pemeliharaan Jalan Nasional</b>
	Sasaran kegiatan	Pemeliharaan Jalan Nasional
	Output Kegiatan	a. Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan
		b. Preservasi rekonstruksi, rehabilitasi jalan
		c. Preservasi Rutin Jembatan
		d. Preservasi Jembatan

	e. Layanan Dukungan Administrasi Satker
--	---

**Indikator Kinerja Output pada tahun 2019**

No	SKPD DINAS PRASARANA JALAN PROVINSI SUMATERA BARAT	SATUAN	TARGET 2019	
			AWAL	REVISI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pemeliharaan Rutin Jalan	Km	49.11	-
2	Pemeliharaan Rutin Kondisi	Km	8.03	-
3	Penunjang (Holding)	Km	3.77	-
4	Rehabilitasi Minor Jalan	Km	0.70	-
5	Longsor	Km	0.05	-
6	Pemeliharaan Rutin Jembatan	meter	281.1	-
7	Pemeliharaan Berkala Jembatan	meter	50	-
8	Pemantauan Pelaporan Secara Elektronik	layanan	12	-
9	Administrasi Kegiatan	layanan	12	-
10	Penyusunan Laporan Keuangan BMN	layanan	12	-

**Pelaksanaan program/kegiatan**

1. Pencapaian kinerja Fisik Satker Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019 ini cukup baik hal ini bisa dilihat pada capaian dengan dana DIPA Rp. 8.123.284.000,- realisasi fisik 100 % dengan rincian :
  - Pemeliharaan Rutin Jalan ditargetkan 49,11 Km, terealisasi fisik sebesar 100 %.
  - Pemeliharaan Rutin Kondisi ditargetkan 8,03 Km, terealisasi fisik sebesar 100 %.
  - Kinerja penunjang (holding) ditargetkan 3,77 Km, terealisasi fisik sebesar 100%.
  - Rehabilitasi Minor Jalan ditargetkan 0,70 Km, terealisasi fisik sebesar 100%.
  - Longsor ditargetkan 0,05 Km, terealisasi fisik sebesar 99,64%.
  - Pemeliharaan Rutin Jembatan ditargetkan 281,1 meter, terealisasi fisik 100%.
  - Pemeliharaan Berkala Jembatan ditargetkan 50 meter, terealisasi fisik 100%.

**2. Pencapaian Kinerja Keuangan**

Pencapaian kinerja keuangan Satker Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019 ini adalah sebesar sebesar Rp. 7.801.539.370- ( 96,039 % ).



LAPORAN KINERJA BALAI TRIWULANAN  
TAHUN ANGGARAN 2019  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

	kinerja >=0% dan <30%
	kinerja >=30% dan <50%
	kinerja >=50% dan <60%
	kinerja >=60% dan <70%
	kinerja >=70% dan <80%
	kinerja >=80% dan <90%
	kinerja >=90% dan <100%

No	Kode	Program/ Kegiatan/Output	Target	Pagu (Rp. Ribu)	Realisasi (Rp. Ribu)	Keuangan		Fisik			Capaian Target
						RN	RL	RN	RL	Kinerja	
1	2409.	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	0	8.123.284,00	7.801.539,37	0,00	96,04	100,00	99,17	99,17	
2	2409.001	Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan	60,91	2.165.830,00	2.095.263,00	0,00	96,74	100,00	100,00	100,00	
3	2409.001	Pemeliharaan Rutin	49,11	1.289.460,00	1.218.894,00	100,00	94,53	100,00	100,00	100,00	
4	2409.001	Pemeliharaan Rutin Kondisi	8,03	433.110,00	433.110,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5	2409.001	Penunjangan/ Holding	3,77	443.260,00	443.259,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
6	2409.002	Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	0,75	4.276.800,00	4.101.809,10	0,00	95,91	100,00	99,75	99,75	
7	2409.002	Rehabilitasi Minor Jalan	0,7	1.276.800,00	1.227.399,00	100,00	96,13	100,00	100,00	100,00	
8	2409.002	Penanganan Longsor	0,05	3.000.000,00	2.874.410,10	100,00	95,81	100,00	99,64	99,64	
9	2409.004	Preservasi Rutin Jembatan	281,1	281.100,00	243.760,00	0,00	86,72	100,00	100,00	100,00	
10	2409.004	Pemeliharaan Rutin Jembatan	281,1	281.100,00	243.760,00	100,00	86,72	100,00	100,00	100,00	
11	2409.005	Preservasi Jembatan	50	134.800,00	128.418,00	0,00	95,27	100,00	100,00	100,00	
12	2409.005	Pemeliharaan Berkala Jembatan	50	134.800,00	128.418,00	100,00	95,27	100,00	100,00	100,00	
13	2409.015	Layanan Dukungan Administrasi Satker	36	1.264.754,00	1.232.289,27	0,00	97,43	100,00	95,52	95,52	
14	2409.015	Penyusunan Laporan Keuangan BMN	12	61.932,00	61.573,28	100,00	99,42	100,00	98,87	98,87	
15	2409.015	Sistem Pelaporan Secara Elektronik (e-Monitoring)	12	22.750,00	22.745,30	100,00	99,98	100,00	99,98	99,98	
16	2409.015	Administrasi Kegiatan	12	1.180.072,00	1.147.970,69	100,00	97,28	100,00	95,26	95,26	

#### **4.5 Sumber dan Jumlah Anggaran**

Sumber dana tugas pembantuan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019 adalah dana APBN tahun 2019 dengan nomor DIPA (Revisi ke 03) : SP DIPA-033.04.4.089258/2019 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 8.123.284.000,- (*Delapan Miliar Seratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah*).

#### **4.6 Permasalahan dan Solusi**

Pada tugas pembantuan ini tidak ada masalah atau kendala yang berarti sehingga pelaksanaan dapat mencapai target yang diinginkan.



## **BAB 5. STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

Hasil Penerapan SPM Pekerjaan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

<b>No</b>	<b>Jenis Pelayanan Dasar Provinsi</b>	<b>Indikator</b>	<b>Realisasi</b>
1	Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	% akses yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota	0%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota	% rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT	0%
		% rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD	0%

Kendala Penerapan SPM Provinsi Sumatera Barat :

- a. SPM Air Limbah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat
  - Belum adanya penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik yang bersifat regional di Sumatera Barat
  
- b. SPM Air Minum Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat
  - Proses administrasi penyediaan air minum lintas kabupaten/kota (regional) provinsi Sumatera Barat sedang berlangsung. Proses yang telah dilakukan yaitu adanya kesepakatan kabupaten/kota yang bersangkutan, penandatanganan Mou dan penyusunan FS (Feasibility Study). Ada beberapa proses lagi yang harus dilakukan yaitu penyusunan master plan, DED dan pembangunan fisiknya.

## **BAB 6. PENUTUP**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 merupakan cerminan capaian target kinerja dalam rangka menunjang tercapainya sasaran strategis pada tahun selanjutnya. LPPD disusun berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan terhadap Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) yang telah ditetapkan sebelumnya. LPPD ini merupakan laporan terintegrasi dan terkonsolidasi (*integrated and consolidated report*) terhadap pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat secara keseluruhan 16 (enam belas) program, meliputi: 11 (sebelas) program utama dan 5 (lima) program pendukung. Pada masing-masing program terdiri dari beberapa kegiatan.

Penilaian kinerja dilakukan terhadap program dan kegiatan berdasarkan realisasi fisik maupun keuangannya. Pada laporan ini, dilakukan pengukuran capaian kinerja secara kuantitatif dan dilanjutkan dengan analisis penilaian kinerja secara kuantitatif dengan terlebih dahulu menetapkan kriteria skala kualitatif sehingga dapat diketahui kinerja program/kegiatan secara kualitatif.

Pada tahun anggaran 2019 terdapat (dua) sasaran strategis Dinas yang seluruhnya dapat diukur berdasarkan target indikator kinerjanya masing-masing. Pada umumnya target indikator kinerja yang telah ditetapkan pada Penetapan Kinerja sebelumnya dapat tercapai melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada pada masing-masing program.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Total penyerapan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2019 ini adalah sebesar 82,45% (Rp. 395,100,652,064.6,- dari total pagu anggaran sebesar Rp. 479,186,523,089.00,-. Kualitas pencapaian kinerja keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat terhadap program-program tahun 2019 yaitu bahwa terdapat 12 (dua belas) program berkinerja sangat baik dan 4 (empat) program berkinerja baik.
2. Dari 16 (enam belas) program yang ada pada tahun 2019, capaian kinerja fisik pekerjaan terlaksana dengan kinerja sangat baik dengan persentase capaian rata-rata 98,21 %.
3. Penilaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 ini menjadi salah satu bahan untuk pengukuran kinerja Pemerintah Provinsi sesuai Penetapan Kinerja yang ada.

4. Kendala-kendala yang dihadapi pada tahun 2019 dapat dijadikan cerminan untuk antisipasi pada tahun-tahun berikutnya.

Padang, Januari 2020  
Kepala Dinas



**Ir. FATHOL BARI, M.Sc.Eng**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19640515 199003 1 010